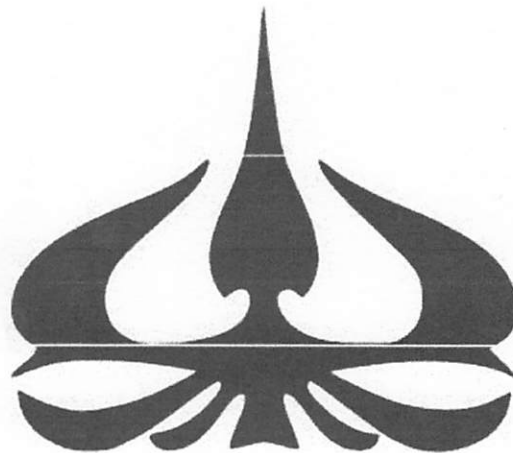


THESIS

**Penerapan PSAK 50 dan 55 pada Bank Konvensional
di Indonesia**

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai Master Akuntansi (MSi)



Di susun Oleh :

**Nama: Rachmat Pramukti.SE.
NIM : 123.09.1052**

**UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM AKUNTANSI
JAKARTA
FEBRUARI 2012**

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Rachmat Pramukti, SE

NIM : 123.09.1052

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, Februari 2012



(Rachmat Pramukti, SE)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

1. Nama : Rachmat Pramukti. SE.
2. NIM : 123.09.1052
3. Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
4. Judul Tesis : Penerapan PSAK 50 dan 55 pada Bank Konvensional
Di Indonesia

Jakarta, 28 Maret 2012

Menyetujui,
Pembimbing Tesis,



(Drs. Zainul Arifin, MBA)

Mengetahui,

Ketua Program Magister Akuntansi







Prof. Dr. Sofyan S Harahap)

UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Rachmat Pramukti.SE.
NIM : 123.09.1052
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul Tesis : Penerapan PSAK 50 dan 55 Pada Bank Konvensional di Indonesia

PANITIA PENGUJI TESIS

Dr. Yvonne Agustinne, AK., MM : 
Ketua penguji
Drs. Zainul Arifin, MBA : 
Pembimbing tesis
Prof. Dr. Itjang D Gunawan, AK., MBA : 
Penguji I
Dr. Noor Hamid Ustadi, AK., MSI : 
Penguji II

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna mencapai gelar Magister Akuntansi.

Jakarta, 28 Maret 2012
Ketua Program Magister Akuntansi

(Prof. Dr. Sofyan S Harahap)

SUMMARY

Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 disadari sebagai standar akuntansi yang penerapannya cukup kompleks bagi perbankan karena terkait dengan pengaturan instrumen keuangan yang sangat dinamis dan pemenuhan persyaratan kecukupan permodalan minimum bank dan penerapan pada pelaporan keuangan bank. Konsep PSAK 50/55 menuntut bank menentukan cadangan berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau *incurred loss*. Data yang menjadi patokan harus berusia minimal tiga tahun, meski idealnya antara tiga sampai lima tahun. Diharapkan dengan penerapan PSAK 50 dan 55 secara tepat dan konsisten, laporan keuangan bank dapat disajikan secara lebih wajar dan memberi informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi mengacu pada International Accounting Standard (IAS) 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. PSAK 50 dan 55 diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Itu juga akan mendorong terciptanya market discipline. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 bagi perusahaan perbankan di Indonesia :

1. Untuk keseragaman laporan keuangan, yang mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan antara satu perusahaan perbankan dengan perusahaan perbankan lainnya.
2. Agar laporan keuangan lebih informative, dapat mencerminkan kegiatan operasional secara rinci.
3. Mempermudah pemantauan terhadap perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan, sebagai pertimbangan yang handal dalam pengambilan keputusan.

Pada PSAK No. 50 (1998), istilah yang disebut-sebut sebagai instrumen keuangan diistilahkan dengan sebutan “efek”, yang memiliki definisi: “ *Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat*

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006) mendefinisikan instrumen keuangan adalah :*“Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain”*

“PSAK 50 dan 55 sudah sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) dan berlaku 1 Januari 2009. Pada 2011 akan dilakukan adopsi penuh tanpa diskresi,” katanya, seperti yang ditulis dalam harian Bisnis Indonesia terbitan 18 Januari 2010 tersebut. Adapun beberapa pengaturan dalam PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 revisi 2006 tersebut secara mendasar merubah metode pengakuan dan pencatatan yang diterapkan selama ini dan dampaknya akan merubah sistim pencatatan bank khususnya, sehingga secara tidak langsung akan memerlukan penyesuaian pada sistim internal bank. Diharapkan dengan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 revisi 2006 tersebut secara tepat dan konsisten, laporan keuangan bank dapat disajikan secara wajar dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Namun, berkaitan dengan krisis finansial global yang melanda dunia dan turut berdampak pada perekonomian di Indonesia, menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan sehingga beberapa waktu yang lalu pihak perbankan telah mengajukan penundaan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 tersebut kepada pemerintah (Bank Indonesia), dengan tujuan agar perbankan bisa lebih bergerak dan likuiditas sedikit longgar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ PENERAPAN PSAK No.50 DAN PSAK No.55 PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA “, dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Di samping itu, penulisan tesis ini merupakan ajang pelatihan bagi penulis dalam membuat tulisan ilmiah.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan tesis ini bukan semata-matanya hasil kerja penulis. Selama proses penyusunan ini, telah banyak menerima bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus dan ikhlas penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Prihartono, sebagai Ketua Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAc., selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti dan sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. Yuswar, selaku Ketua Dosen Penguji Tesis.
4. Drs. Puspa, selaku Dosen Penguji Tesis.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. KONTRIBUSI PENELITIAN... ..	7
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1. PSAK 50	9
2. Instrumen Keuangan pada Perbankan.....	10
3. Instrumen Keuangan pada PSAK 50 dan 55	11
4. Penerapannya pada Industri Perbankan	24
5. Karakteristik Perusahaan Perbankan	32
6. Unsur Laporan Keuangan bagi Pengusahaan Perbankan.....	41
B. KERANGKA TEORITIS	
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. RANCANGAN PENELITIAN.....	48
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	48
C. METODE ANALISIS DATA.....	49
BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN.....	51
1. Sejarah Bank Bukopin... ..	51
B. ANALISIS DATA.....	59
C. PEMBAHASAN	62
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN... ..	90
B. PENELITIAN LANJUTAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perbandingan pengukuran menurut PSAK No. 50 (1998) dengan PSAK No. 50 (revisi 2006).....	16
2. Tabel 1.2 Aturan Pemulihan (restorasi) Nilai pada Penurunan Nilai (<i>impairment</i>).....	20
3. Tabel 4.1: Pergerakan pinjaman – PRK pada tahun 2009.....	64
4. Tabel 4.2: Prosentase <i>Probability of Default</i> – PRK.....	66
5. Tabel 4.3: Posisi Pinjaman – PRK sebelum dan sesudah menggunakan PSAK.....	68
6. Tabel 4.4: Pergerakan pinjaman – <i>Reguler</i> pada tahun 2009.....	72
7. Tabel 4.5: Prosentase <i>Probability of Default</i> – <i>Reguler</i>	74
8. Tabel 4.6: Posisi pinjaman <i>reguler</i> Bank Bukopin kantor pusat.....	76
9. Tabel 4.7: Pergerakan pinjaman – <i>Installment</i> tahun 2009.....	79
10. Tabel 4.8: Prosentase <i>Probability of Default</i> – <i>Installment</i>	81
11. Tabel 4.9: Posisi Pinjaman <i>Installment</i> Bank Bukopin Kantor Pusat.....	83
12. Tabel 4.3.3: Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan PSAK 50 dan 55.....	87

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank	53
--	----

ABSTRAK

Adanya fakta bahwa kemajuan teknologi membuat informasi keuangan menjadi penting, karenanya mau tidak mau atau suka tidaksuka, memikirkan dan mencari standar yang mampu menerapkan bagi pengusaha dan perbankan yakni PSAK No. 50 dan 55 . Permasalahan yang ada dalam penelitian adalah bagaimana Penerapan PSAK No.50 dan 55, bagi pengusaha dan perbankan terhadap pengukuran, pencatatan, pengakuan, pelaporan, dan disclosure. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menghimpun standard dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan perbankan dimana telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan perusahaan perbankan, Mendukung perusahaan perbankan agar mampu secara professional mengusahaakan ritme perbankan secara baik, menaati semua ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Penelitian dilakukan berdasarkan metode yang bersifat deskriptif, kualitatif dan studi kasus dengan memberikan penjelasan yang teoritis dan sistematis atas data sekunder dari hasil penelitian pada perusahaan perbankan. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No.50 dan 55 bagi perusahaan perbankan masih terdapat banyak perusahaan yang penerapannya memiliki nilai yang berbeda ,apakah sesuai dengan PSAK No. 50 dan 55 atau tidak sesuai dengan PSAK 50 dan 55. Karena ketidak sesuaian laporan keuangan tersebut maka diharapkan pengusaha perbankan hendaknya menerapkan PSAK No. 50 dan 55 dalam mengelola perusahaan perbankan agar laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang ada di Indonesia.

ABSTRACT

The fact that technological advances make financial information becomes important, therefore would not want or like it or not , think about and look for standards that are able to apply for the entrepreneur and the bank SFAS 50 and 55. The problems that exist in the study is how the application of SFAS 50 and 55, for employers and banks to measurement, recording, recognition, reporting, and disclosure. The purpose of the study was to gather accounting standards and practices relevant to banking activities which have been arranged in the Financial Accounting Standards Board, creating a uniform application of the accounting treatment and presentation of financial statements so enhancing the comparability between the financial statements of the banking company, banking company supports to be able to seek professional banking good rhythm, comply with all the provisions and obligations as determined by Bank Indonesia . The study was conducted based on the method is descriptive, qualitative and case studies to provide a systematic explanation of the theoretical and upper secondary data from the research on corporate banking. After doing some research, it can be concluded that the application of SFAS 50 and 55 for the banking companies there are many companies whose application has different values, whether in accordance with SFAS No. 50 and 55 or not in accordance with SFAS 50 and 55. Because those statements discrepancy is expected employers should apply SFAS No. banking. 50 and 55 in banking in order to manage the company's financial statements are in accordance with the standards that exist in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka konvergensi dengan International Accounting Standards (IAS) dan International Financial Reporting Standards (IFRS), sejak Desember 2006 sampai dengan pertengahan tahun 2010 kemarin. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC).

Indonesia atau local standard harus mengadopsi standar akuntansi internasional (International Accounting Standard/IAS) untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Bank Indonesia mewajibkan bank menggunakan laporan keuangan dengan mengacu pada revisi PSAK 50/2006 dan PSAK 55/2006 rencana semula mulai 2009 sementara standar akuntansi internasional akan diadopsi penuh pada 2011. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 disadari sebagai standar akuntansi yang penerapannya cukup kompleks bagi perbankan karena terkait dengan pengaturan instrumen keuangan yang sangat dinamis dan pemenuhan persyaratan kecukupan permodalan minimum bank dan penerapan pada pelaporan keuangan bank. Namun sesuai ketentuan Bank Indonesia penerapannya bagi bank-bank secara menyeluruh harus sudah dilaksanakan pada tahun 2011 sekarang. Pengakuan dan Pengukuran menggantikan PSAK 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai; PSAK 50 (revisi 2006) tentang Penyajian Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 50 tentang Akuntansi Investasi Efek tertentu. Adapun pengertian konvergensi 50 & 55 ialah penyamaan bahasa bisnis dalam mengatur standard keuangan.

Namun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menunda penghapusan PSAK 31/2000 hingga akhir 2009, menyusul penangguhan setahun penerapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50/2006 dan PSAK 55/2006. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah merevisi dan mengesahkan lima Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tiga dari revisi PSAK tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 yaitu PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi, PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap serta PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang sewa . Sedangkan dua PSAK lainnya, yaitu masing-masing PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu serta PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 .Adapun PSAK No. 50 (revisi 2006) sebagian

besar sudah sesuai dengan International Accounting Standards (IAS) No. 32 : Financial Instrument : Presentation (Revised 2005) sedangkan PSAK No. 55 (revisi 2006) sebagian besar sudah sesuai dengan IAS No. 39 :Financial Instrument : Recognition and Measurement (Revised 2005). Bank Indonesia mewajibkan bank menyajikan laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK No. 50 (revisi 2006) serta PSAK No. 55 (revisi 2006) tersebut mulai tahun 2011 seperti yang ditulis dalam harian Bisnis Indonesia terbitan 18 Januari 2010 kemarin.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008, Bank Indonesia telah menegaskan bahwa PSAK 50 dan 55 akan diimplementasikan secara penuh tanpa pengecualian, maka diharapkan perbankan melakukan penyesuaian sehubungan dengan perubahan perlakuan akuntansi instrumen keuangan dari periode sebelumnya, di mana dampak penyesuaian tersebut diakui pada L/R periode sekarang. Peraturan Bank Indonesia tersebut sangat mempengaruhi operasional bank, tidak hanya dalam akuntansi, tetapi mencakup struktur organisasi, teknologi informasi, dan pola pikir sumber daya manusia bank. Dengan penerapan PSAK 50 dan 55 ini, maka pelaporan keuangan bank dapat disajikan lebih wajar dan memberi informasi yang lebih bermanfaat bagi *user*, dan bank pun lebih siap dalam menghadapi era globalisasi.

Penerapan PSAK tersebut dilaksanakan untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, dan pada tahun 2011 akan dilakukan adopsi penuh tanpa pengecualian. Beberapa pengaturan dalam PSAK dimaksud secara mendasar merubah metode pengakuan dan pencatatan yang telah diterapkan selama ini dan dampaknya akan merubah sistem pencatatan bank, sehingga secara tidak langsung akan memerlukan penyesuaian pada sistem internal bank. Penerapan peraturan ini tidak mungkin ditunda, karena justru akan mempersulit posisi bank dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat serta memperbesar masalah yang akan dihadapi.

Deputi Direktur Pengawasan II Bank Indonesia (BI) Duddy Iskandar menuturkan, dengan merujuk PSAK 50/55, bank harus melaporkan kondisi neraca yang benar saat pelaporan. "Kalau pencadangannya tidak besar, bank tidak boleh menumpuk terlalu banyak. Sisa pencadangan

dimasukkan sebagai laba ditahan, di sisi aset. Jadi, kalau laba besar harus dilaporkan besar. Sebaliknya, kalau kecil, ya kecil," .Konsep PSAK 50/55 menuntut bank menentukan cadangan berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau *incurred loss*. Data yang menjadi patokan harus berusia minimal tiga tahun, meski idealnya antara tiga sampai lima tahun. Diharapkan dengan penerapan PSAK 50 dan 55 secara tepat dan konsisten, laporan keuangan bank dapat disajikan secara lebih wajar dan memberi informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan.

PSAK 50 dan 55 merupakan standar akuntansi mengacu pada International Accounting Standard (IAS) 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments dan IAS 32 mengenai Presentation and Disclosures of Financial Instruments. PSAK 50 dan 55 diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Itu juga akan mendorong terciptanya market discipline. Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 4 /DPNP tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mengharuskan Bank menerapkan PAPI 2008 sebagai acuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku.

PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan. PAPI juga mencakup penjabaran lebih lanjut dari PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Selain itu Bank Indonesia juga melalui surat edaran No. 10/537/DPNP tanggal 2 September 2009 diharapkan perbankan melakukan persiapan dari segi tenaga pelaksana (sumber daya manusia)

Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah :

1. Untuk menghimpun standard dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan perbankan dimana telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

2. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan perusahaan perbankan.
3. Mendukung perusahaan perbankan agar mampu secara professional mengusahaakan ritme perbankan secara baik, menaati semua ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

“PSAK 50 dan 55 sudah sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) dan berlaku 1 Januari 2009. Pada 2011 akan dilakukan adopsi penuh tanpa diskresi,” katanya, seperti yang ditulis dalam harian Bisnis Indonesia terbitan 18 Januari 2010 tersebut. Adapun beberapa pengaturan dalam PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 revisi 2006 tersebut secara mendasar merubah metode pengakuan dan pencatatan yang diterapkan selama ini dan dampaknya akan merubah sistim pencatatan bank khususnya, sehingga secara tidak langsung akan memerlukan penyesuaian pada sistim internal bank.

Diharapkan dengan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 revisi 2006 tersebut secara tepat dan konsisten, laporan keuangan bank dapat disajikan secara wajar dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Namun, berkaitan dengan krisis finansial global yang melanda dunia dan turut berdampak pada perekonomian di Indonesia, menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan sehingga beberapa waktu yang lalu pihak perbankan telah mengajukan penundaan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 tersebut kepada pemerintah (Bank Indonesia), dengan tujuan agar perbankan bisa lebih bergerak dan likuiditas sedikit longgar.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 bagi perusahaan perbankan di Indonesia :

4. Untuk keseragaman laporan keuangan, yang mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan antara satu perusahaan perbankan dengan perusahaan perbankan lainnya.
5. Agar laporan keuangan lebih informative, dapat mencerminkan kegiatan operasional secara rinci.

6. Mempermudah pemantauan terhadap perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan, sebagai pertimbangan yang handal dalam pengambilan keputusan.

Objek yang dipilih oleh penulis adalah perusahaan perbankan nasional yang berada di Indonesia. Karena PSAK yang baru, membuat bank menjadi lebih baik, dan buat otoritas menjadi lebih mudah memberikan solusi dalam setiap kebijakan, Oleh sebab itu penerapan PSAK masih dalam masa transisi selama setahun, sambil mempelajari penerapan di beberapa negara yang juga ada persoalan seperti Singapura dan Australia. Selain itu, pembebanan modal untuk memenuhi perhitungan risiko operasional ditempuh bertahap agar menjaga keharmonisan pelaporan keuangan perusahaan perbankan serta kenyamanan bagi pembaca laporan keuangan,.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “ **PENERAPAN PSAK No.50 DAN PSAK No.55 PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA** “.

Agar penerapan PSAK 50 dan 55 diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan dan disiplin pasar. Selain itu, penerapan PSAK 50 dan 55 secara tepat dan konsisten diharapkan bisa membuat laporan keuangan bank dapat disajikan secara lebih wajar dan memberi informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Objek penelitian yang diambil oleh penulis adalah perusahaan perbankan nasional di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengukuran dan penerapan laporan keuangan sesuai PSAK No.50 dan PSAK No.55 ?
2. Bagaimana pencatatan dan pengakuan atas laporan keuangan perusahaan perbankan konvensional di Indonesia ?

3. Apa saja yang harus diungkapkan dan apakah sudah menerapkan PSAK No.50 dan PSAK No.55 dalam perusahaan perbankan konvensional di Indonesia ?
4. Masalah apa saja yang dihadapi perusahaan perbankan konvensional dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.50 dan PSAK No.55 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dan pelaporan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.50 dan PSAK No.55.
2. Mendapatkan gambaran terhadap pencatatan dan pengakuan laporan keuangan perusahaan perbankan konvensional.
3. Untuk mengetahui pengungkapan pelaporan perusahaan perbankan konvensional dan apakah sudah menerapkan PSAK No.50 dan PSAK No.55 bagi perbankan tersebut.
4. Mengetahui tentang kondisi keuangan dalam menyusun laporan yang sesuai PSAK No.50 dan PSAK No.55.

1.4. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar perusahaan perbankan konvensional di Indonesia dapat melakukan pengukuran dan pelaporan unsure-unsur laporan keuangan sesuai PSAK No.50 dan PSAK No.55.
2. Supaya perusahaan perbankan dapat melakukan pencatatan dan pengakuan sesuai dengan Akuntansi dari PSAK No.50 dan PSAK No.55.

3. Diharapkan pengungkapan laporan akuntansi dan penerapannya sudah berdasarkan PSAK No.50 dan PSAK No.55 yang menjadi salah satu informasi yang relevan dan akurat bagi pihak yang membutuhkan.
4. Agar perusahaan perbankan konvensional dapat menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan berdasarkan PSAK No.50 dan PSAK No.55.

1.5. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan kondisi keuangan pada perusahaan publik melalui data yang terdapat dalam laporan keuangan dengan mencerminkan kegiatan operasional dan menilai kinerja bagi perusahaan perbankan konvensional. Dengan metode penelitian deskriptif dikarenakan data yang dikumpulkan untuk penelitian berasal dari *literature* dan dokumentasi sekunder di Bank Indonesia yang merupakan suatu permasalahan yang sedang maraknya dibicarakan saat ini.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam penyusunan tesis ini atas penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 bagi perusahaan perbankan konvensional di Indonesia, maka penulis akan menguraikan secara singkat isi materi pokok tesis ini dari bab per bab. Dimana penyusunan tesis ini terdiri dari 5 bab, dengan penyajian bab per bab seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

Bab satu adalah bab pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang dipilih, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua mengenai landasan teori. Dalam bab ini akan menguraikan teori yang menjadi dasar penyusunan tesis yang dituangkan dalam tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Dalam tinjauan pustaka akan menjelaskan tentang pengukuran dan pelaporan laporan keuangan,

pencatatan dan pengungkapan atas laporan keuangan bagi perusahaan perbankan, penyusunan laporan keuangan yang terutama tentang pemahaman karakteristik perusahaan perbankan, maksud dan tujuan perusahaan perbankan, gambaran umum kegiatan perusahaan perbankan dan perlakuan akuntansinya, laporan keuangan perusahaan perbankan seperti asumsi dasar laporan perusahaan perbankan sebelumnya.

Bab tiga adalah bab metodologi penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Bab ini akan menguraikan mengenai rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab empat adalah merupakan hasil analisis, bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian yang berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti, seperti pelaksanaan kegiatan perusahaan perbankan, sejarah perusahaan, Bank Indonesia, penelitian tentang PSAK No.50 dan PSAK No.55, serta pembahasan yang ada diperusahaan perbankan konvensional di Indonesia yang terdiri dari : pengukuran dan pelaporan keuangan, pencatatan dan pengakuan laporan keuangan, pengungkapan laporan keuangan dan penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 bagi perusahaan perbankan serta penyusunan laporan keuangan perusahaan perbankan yang merupakan bagian utama dalam tesis ini.

Bab lima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan penelitian lanjutan. Bab ini merupakan isi dari keseluruhan permasalahan dengan pernyataan yang singkat dan tepat, juga memuat saran yang akan dikemukakan oleh penulis berdasarkan penelitian dan pengalaman yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

PSAK 50

Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK) pada 15 Juli 1998 mengesahkan PSAK No.50 tahun 1998 tentang *Akuntansi Investasi Efek Tertentu*. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999. Kemudian dilanjutkan dengan PSAK 55 tentang *Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai* dikeluarkan pada tanggal 21 September 1998 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2000.

Karena dianggap kedua PSAK tersebut belum sesuai dengan standar Internasional, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), yang dulunya disebut Komite Standar Akuntansi Keuangan (KSAK) mengesahkan revisi atas PSAK No. 50 (1998) tersebut yaitu PSAK No.50 (revisi 2006) tentang *Instrumen Keuangan : Penyajian dan pengungkapan* dan PSAK No.55 (revisi 2006) tentang *pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan* pada tanggal 16 Desember 2006. Kedua PSAK ini pada rencananya diberlakukan pada 1 Januari 2009. Namun, karena bank-bank di Indonesia menyatakan belum siap menggunakan PSAK No. 50 (revisi 2006) ini, maka pemberlakuannya diundur hingga 1 Januari 2010.

Belum sempurna penerapan yang dilakukan perbankan dan lembaga keuangan terhadap PSAK tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan lagi ED PSAK 50 (revisi 2010): *Instrumen Keuangan: Penyajian* dalam rapatnya pada tanggal 22 Mei 2010. ED PSAK 50 (revisi 2010): *Instrumen Keuangan: Penyajian* rencananya akan merevisi PSAK 50 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan*. Sedangkan, untuk pengungkapan Instrumen Keuangan, dikeluarkannya ED PSAK 60 (revisi 2010). ED atau Exposure Draft merupakan draft PSAK yang akan dimintakan tanggapan kepada masyarakat. Alasan DSAK dan IAI mengeluarkan ED ini, tidak lain karena ingin segera ‘mengejar target’, karena pada 2012 nanti Indonesia sudah harus mengadopsi seluruh standar IFRS.

2.2 Instrumen Keuangan pada Perbankan

Menurut standar lama, instrumen keuangan yang dimiliki oleh perbankan hanyalah sebatas pada instrumen pasar uang (*money market*) serta instrumen pasar modal (*capital market*) yang meliputi surat berharga komersial, saham, surat pengakuan utang, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Apabila standar baru yang digunakan, kecuali aktiva tetap, hampir seluruh item pada laporan keuangan perbankan merupakan instrumen keuangan. Hal ini cukup mengundang perdebatan karena definisi tersebut mencakup dua kelompok item paling besar baik pada sisi debit, maupun sisi kredit, yakni simpanan (*deposit atau receivable*) dan kredit (*loan*). Hal ini disebabkan karena pada PSAK No. 50 (1998) yang merupakan standar lama, belum sesuai dengan IFRS. Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006) sudah tercakup jenis instrumen keuangan “Loan and Receivable”, sama seperti IAS 32. JWGSS (1999), JWGBA (1999a), Gebhart (2003) menjelaskan mengenai pengelompokkan aktivitas bank menjadi *trading book* dan *banking book*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No : 5/12/PBI/2003, “*Seluruh posisi perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang (1) dimaksud untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek ;(2) dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan suku bunga; (3) timbul dari kegiatan perantaraan(brokering) dan kegiatan pembentukan pasar (market marking); atau (4) diambil untuk tujuan lindung nilai (hedging) komponen trading book lain*”.

Sedangkan *banking book* menurut PBI No:5/12/PBI/2003 adalah semua elemen atau posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *trading book*.

Berdasarkan pengelompokkan tadi, instrumen keuangan yang termasuk ke dalam *trading book* adalah kategori “*Fair Value Through Profit or Loss*”, derivatif, dan instrumen lindung nilai (*hedge*) seperti *forward contract*, opsi, *interest rate*, *swap* dan sebagainya. Sedangkan instrumen keuangan yang termasuk di dalam kategori *banking book* adalah kredit, simpanan (giro, deposito, tabungan), own bond issues atau dengan kata lain instrumen “*Loan and Receivable*”.

2.2.1. Instrumen Keuangan pada PSAK 50 dan 55

a. Definisi (Definition)

Pada PSAK No. 50 (1998), istilah yang disebut-sebut sebagai instrumen keuangan diistilahkan dengan sebutan “efek”, yang memiliki definisi :

“ Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006) mendefinisikan instrumen keuangan adalah :
“Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain”.

Selain itu, definisi tersebut mencakup :

- a. Aset keuangan, adalah setiap aset yang berbentuk :
 1. Kas
 2. Instrumen ekuitas milik entitas lain
 3. Hak kontraktual
 - i. Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain
 - ii. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, atau
 4. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas milik entitas yang bersangkutan dan merupakan suatu :
 - i. Non derivatif dalam hal entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang variabel (variable number) dan instrumen keuangan milik entitas, atau
 - ii. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain untuk suatu jumlah yang ditetapkan (fixed amount) dari instrumen ekuitas milik entitas.
- b. Kewajiban keuangan, setiap kewajiban berupa :
 1. Kewajiban kontraktual

- i. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - ii. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas tersebut
2. Kontrak yang akan atau mungkin disesuaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas milik entitas yang bersangkutan dan merupakan suatu :
- i. Non-derivatif dalam hal entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang variabel (variabel number) dan instrumen ekuitas milik entitas ; atau
 - ii. Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain untuk suatu jumlah yang ditetapkan (fixed amount) dari instrumen ekuitas milik entitas.
- c. Instrumen ekuitas, adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangkan dengan seluruh kewajibannya.

Definisi instrumen keuangan/ efek pada PSAK No. 50 (1998) lebih mengacu kepada macam-macam instrumen keuangan itu sendiri, seperti surat pengakuan utang, saham, obligasi dan sebagainya. Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006) lebih menekankan pada pengertian “kontrak” sehingga memiliki cakupan pengertian instrumen keuangan yang lebih luas. Sebagai contohnya piutang (*receivable*), jika mengacu pada PSAK No. 50 (1998), maka piutang (*receivable*) ini tidak termasuk dalam kategori efek. Sedangkan apabila memakai acuan PSAK No. 50 (revisi 2006), piutang ini masuk ke dalam instrumen keuangan. Hal ini disebabkan karena bagi pihak yang memberikan piutang, maka nilai Asetnya bertambah dan bagi yang berhutang nilai kewajibannya bertambah. Hal ini memenuhi pengertian instrumen keuangan menurut PSAK No. 50 (revisi 2006).

Pada ED PSAK No. 50 (revisi 2010), definisinya tidak banyak berubah dari definisi PSAK 50 tahun 2006, tetapi ada tambahan yaitu mengenai Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*). (*Puttable instrument*) adalah *instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat*

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang atau kematian atau purna karya dari pemegang instrumen.

Sebelumnya, hal ini tidak ada pada PSAK 50 tahun 2006. Untuk selanjutnya bahasan akan kita persempit pada PSAK No. 50 (1998) dan PSAK No. 55 (1999) serta PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006) saja karena PSAK inilah yang sedang diterapkan di Indonesia sekarang ini.

b) Klasifikasi(classification)

PSAK No. 50 (1998) mengklasifikasikan instrumen keuangan (istilah dalam PSAK ini adalah efek) ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini :

- i. Dimiliki hingga jatuh tempo (Held to maturity)*
- ii. Diperdagangkan (trading)*
- iii. Tersedia untuk dijual (available for sale)*

Bila dilihat pada PSAK ini, maka klasifikasi tersebut sama dengan yang di atur dalam US GAAP. Sedangkan menurut pencatatannya pada neraca, PSAK 50 (revisi 2006) paragraf 7 mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam empat kategori :

- i. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (financial asset at fair value through profit or loss/FVTPL) dengan kriteria :*
 - a) Untuk diperdagangkan (*trading*), termasuk instrumen derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan efektif)
 - b) Ditetapkan (*designated*)
 - ii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (Held to maturity/HTM), dengan kriteria :*
 - a) Aset keuangan non-derivatif
 - b) Pembayaran tetap/telah ditentukan
 - c) Jatuh tempo telah ditetapkan

d) Entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo

iii. Pinjaman yang diberikan dan piutang (*Loan and Receivable/ L&R*), dengan kriteria yang sama dengan HTM hanya saja tidak memiliki kuotasi di pasar aktif (*quoted market*)

iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available for sale / AFS*), dengan kriteria

a) Aset keuangan non-derivatif

b) Ditetapkan sebagai AFS

c) Tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, L&R dan HTM

Kategori yang berbeda dengan PSAK 1998 adalah *Loan and Receivable*. Dengan adanya PSAK No. 50 (revisi 2006) inilah maka Pinjaman dan deposit di industri perbankan memenuhi kriteria sebagai Instrumen Keuangan dan harus diperlakukan dengan memenuhi syarat-syarat dalam PSAK No. 50 (revisi 2006).

c. **Pengakuan (*Recognition*)**

Pengakuan atas instrumen keuangan disesuaikan dengan klasifikasi yang telah penulis jelaskan di atas, Jadi, apabila mengacu kepada PSAK No. 50 (1998), maka diakui ke dalam salah satu dari 3 kategori *Held to Maturity, trading dan Available for Sale* dimana mengklasifikasikan instrumen keuangan tersebut lebih kepada menurut penyajiannya dalam neraca.

PSAK No. 50 (revisi 2006) melakukan pengklasifikasian berdasarkan pengakuan dan pengukurannya yaitu berdasar jangka waktu suatu aset keuangan akan dimiliki ataupun jangka waktu tempo untuk kewajiban keuangan.

d. **Penghentian Pengakuan (*Derecognition*)**

Instrumen keuangan bukanlah instrumen yang akan terus ada di dalam *Balance sheet*. Ia dapat dikeluarkan dari *Balance Sheet* jika terjadi beberapa kondisi seperti :

- jatuh tempo
- pemutusan kontrak

- transfer jual beli instrumen keuangan

PSAK tahun 1998 sedikit sekali membahas mengenai penghentian pengakuan. PSAK No. 55 (revisi 2006) banyak memberikan penekanan pada “keterlibatan berkelanjutan” atau *continuing involvement* jika terjadi transfer aset keuangan. Yakni apakah seluruh resiko dan manfaat secara substansial juga telah ditransfer, dan juga apakah pengendalian terhadap instrumen keuangan tersebut masih dimiliki atau tidak.

e. Pengukuran (*Measurement*)

PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* telah banyak mengadopsi IAS 39 dibandingkan PSAK No. 55 (1999). Ada perbedaan yang mendasar pada pengukuran awal (*initial measurement*) antara PSAK 55 (1998) dengan PSAK 55 (revisi 2006). Sebelumnya, semua instrumen keuangan diukur pada pengukuran awal sebesar *historical cost*, namun menurut PSAK No. 55 (revisi 2006), pengukuran nilai awal instrumen keuangan berdasarkan *fair value*-nya. Khusus untuk *Held to Maturity*, *fair value* tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi ataupun penerbitan instrumen keuangan tersebut.

Perbandingan pengukuran dan pengakuan *gain* atau *loss* dapat dilihat dari perbandingan PSAK No. 50 (1998) dengan PSAK No. 50 (revisi 2006) secara ringkas pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 :
Perbandingan pengukuran menurut PSAK No. 50 (1998) dengan PSAK No. 50 (revisi 2006)

Jenis	PSAK 50 1998	PSAK 55 revisi 2006

FVTPL	<p>. pengukuran awal berdasarkan <i>cost</i> (biaya)</p> <p>. pengukuran selanjutnya berdasarkan <i>fair value</i></p> <p>β. <i>gain</i> atau <i>loss</i> yang belum direalisasi atas efek kategori trading harus diakui sebagai income.</p>	<p>Pengukuran awal berdasarkan <i>fair value</i> (par 43)</p> <p>Pengukuran selanjutnya berdasar <i>fair value</i> (par 46)</p> <p><i>gain</i> atau <i>loss</i> diakui pada income statement.</p>
HTM	<p>. Pengukuran awal berdasarkan <i>cost</i></p> <p>. Pengukuran selanjutnya berdasar <i>amortized cost</i></p>	<p>pengukuran awal berdasarkan <i>fair value</i> (par 43)</p> <p>pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (par 46)</p> <p><i>gain</i> atau <i>loss</i> diakui pada <i>income statement</i>. Terjadi ketika <i>financial asset</i> atau <i>financial liabilities</i> tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi. (par 50)</p>
L&R	Tidak diklasifikasikan	<p>Pengukuran awal berdasar <i>fair value</i></p> <p>Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif</p>

		(par 46) <i>gain</i> atau <i>loss</i> diakui pada <i>income statement</i> . Terjadi ketika <i>financial asset</i> atau <i>financial liabilities</i> tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai dan melalui proses amortisasi. (par 50)
AFS	Pengukuran awal berdasarkan <i>cost</i> Pengukuran selanjutnya berdasarkan <i>fair value</i> <i>gain</i> atau <i>loss</i> yang belum direalisasi atas AFS (termasuk efek yang diklasifikasikan sebagai <i>current asset</i>) harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan terpisah, dan tidak boleh diakui sebagai <i>income</i> sampai <i>gain</i> atau <i>loss</i> tersebut dapat direalisasi.	Pengukuran awal berdasarkan <i>fair value</i> (par 43) Pengukuran selanjutnya berdasarkan <i>fair value</i> (par 46) <i>gain</i> atau <i>loss</i> diakui pada laporan perubahan ekuitas

Sumber : PSAK 50 (1998) dan PSAK (revisi 2006)

Fair value merupakan nilai yang didapat seolah-olah terjadi pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban. Salah satu hal baru yang ada pada PSAK 55 (revisi 2006) ialah aturan mengenai *fair value option*). Jika pada PSAK 50 (1998) instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar hanya instrumen keuangan dengan tujuan untuk diperdagangkan. Dengan pilihan nilai wajar, perusahaan diperbolehkan untuk menetapkan (*designated*) instrumen keuangan diluar untuk keperluan *trading*, sebagai *fair value through profit or loss (FVTPL)*, kecuali instrumen

ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar di pasar aktif, dan yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal (PSAK No. 55 (revisi 2006) par 8).

Masalah penentuan *fair value*, untuk instrumen yang memiliki kuotasi di pasar aktif seperti FVTPL, tentunya mudah untuk menentukan *fair value*nya, namun apabila tidak memiliki pasar aktif *fair value* seperti itu tidak akan didapat. PSAK No. 55 (revisi 2006) AP 86 dan 89 mengatur mengenai pengukuran instrumen yang tidak mempunyai pasar aktif dengan teknik penilaian :

- i. Penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan (*arm's length market transaction*)
- ii. Nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama
- iii. Analisis *discounted cash flow*
- iv. Penggunaan *option pricing model*

f. Reklasifikasi (Reclassification)

Salah satu bentuk kedisiplinan IAS yang diadopsi oleh PSAK No. 50&55 (revisi 2006) adalah dalam masalah reklasifikasi ini. Pada PSAK No. 50 (1998) tidak memberikan larangan mengenai pengklasifikasian ulang instrumen keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi. Hal ini memungkinkan adanya *moral hazard* oleh manajemen perusahaan dengan mereklasifikasi instrumen keuangannya untuk tujuan pemerataan laba atau *income smoothing*.

Sebagai contoh ketika instrumen keuangan yang sebelumnya termasuk dalam HTM ataupun AFS, *fair value*nya meningkat, manajemen kemudian mereklasifikasi instrumen keuangan sebagai "*trading*" agar *gain* yang dihasilkan dari peningkatan *fair value* tersebut dapat langsung diakui di *income statement* sehingga laba akan 'seolah-olah' meningkat.

PSAK No. 55 (revisi 2006) yang mengatur lebih ketat masalah reklasifikasi ini. Ada tiga aturan baru reklasifikasi menurut PSAK ini :

- i. Reklasifikasi dari kelompok klasifikasi manapun DARI atau KE FVTPL tidak diperbolehkan
- ii. Reklasifikasi *Loan and Receivable* DARI atau KE HTM dan FVTPL tidak diperbolehkan
- iii. Reklasifikasi dari AFS menjadi *Loan and Receivable* tidak diperbolehkan

Selain itu, terdapat ‘*tainting rule*’ yaitu larangan untuk mengklasifikasikan HTM selama 2 tahun jika entitas bermaksud menjual atau mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah pokok yang signifikan, kecuali jika sudah mendekati jatuh tempo, jumlah pokok hutang hampir seluruhnya tertagih atau ada kejadian tertentu di luar kendali.

g. Penurunan Nilai (Impairment)

PSAK No. 50 (1998) tidak memberikan panduan yang jelas tentang indikator-indikator penurunan nilai untuk instrumen keuangan. PSAk 50 (1998) menyebutkan bahwa biaya perolehan yang diturunkan nilainya tidak dapat diubah lagi. Mengenai apakah nilai tersebut dapat direstorasi lagi tidak disebutkan dalam PSAK ini.

Sedangkan jika dibandingkan dengan PSAK 50 (1998), PSAK 55 (revisi 2006) memberikan penekanan lebih pada ‘bukti objektif (*objective evidence*)’ yang menjadi dasar dari penurunan nilai tersebut (paragraf 60) dan juga penekanan bahwa evaluasi akan adanya penurunan tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal neraca (paragraf 59). Sebagai contohnya instrumen keuangan jenis FVTPL akan dinyatakan turun nilainya berdasarkan PSAK 55 (revisi 2006) apabila pasar aktif instrumen tersebut hilang karena kesulitan keuangan.

Selain itu, untuk masalah restorasi nilai yang diturunkan, diatur lebih jelas dalam PSAK revisian ini seperti pada tabel 1.2 di bawah ini :

Aturan Pemulihan (restorasi) Nilai pada Penurunan Nilai (<i>impairment</i>)	
Klasifikasi	Perlakuan

FVTPL	Pada FVTPL tidak berlaku penurunan nilai (<i>impairment</i>) karena sudah dinilai dengan nilai wajar
HTM	kerugian karena penurunan nilai dapat dipulihkan
L&R	kerugian karena penurunan nilai dapat dipulihkan
AFS	kerugian karena penurunan nilai instrumen ekuitas sebagai AFS tidak dapat dipulihkan, sedangkan untuk instrumen hutang kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan

h. Instrumen Keuangan Derivatif

Baik PSAK 55 (1999) maupun PSAK 50 (revisi 2006) memiliki definisi yang kurang lebih sama mengenai instrumen derivatif, yakni PSAK No. 50 (revisi 2006)

Suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik sebagai berikut:

a) Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan dalam suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya yang telah ditentukan sepanjang untuk variabel non keuangan bukan merupakan variabel yang ditentukan secara khusus bagi para pihak dalam kontrak tersebut (sering disebut sebagai variabel yang mendasari).

b) Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk kontrak sejenis lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan pengaruh yang sama terhadap perubahan faktor pasar.

d) Diselesaikan pada tanggal tertentu dimasa mendatang

i. Pengungkapan

PSAK 50 (1998) dan 55 (1999):hanya mengatur pengungkapan sesuai dengan ruang lingkup dari setiap PSAK tersebut.Sementara PSAK 50 (revisi 2006) mengatur pengungkapan untuk seluruh instrumen derivatif dengan rinci. Yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meliputi :

1. Format, Tempat dan Klasifikasi Instrumen Keuangan

- Pernyataan ini tidak mengatur format dari informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan atau tempatnya dalam laporan keuangan.

- Pengungkapan dapat berbentuk kombinasi dari penjelasan naratif dan kuantitatif, sepanjang dianggap memadai untuk mengungkapkan karakteristik instrumen dimaksud serta arti pentingnya bagi entitas.

- Manajemen entitas mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam beberapa kelompok sesuai sifat dari informasi yang diungkapkan, dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti karakteristik instrumen tersebut dan dasar pengukuran yang telah digunakan.

2. Kebijakan Manajemen Risiko dan Aktivitas Lindung Nilai

- Mengungkapkan tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan termasuk kebijakan lindung nilainya. Penjelasan kebijakan manajemen risiko harus memuat kebijakan yang menyangkut hal-hal seperti lindung nilai atas eksposur risiko, upaya penghindaran konsentrasi risiko yang berlebihan, dan persyaratan mengenai agunan guna mengurangi risiko kredit.

- Menjelaskan sejauh mana suatu instrumen keuangan digunakan, risiko yang terkait dan sasaran usaha yang ingin dicapai.

- Untuk lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi di luar negeri, pengungkapan terpisah secara lebih spesifik dan terperinci harus dilakukan

3. Persyaratan, Kondisi dan Kebijakan Akuntansi

- Untuk tiap kelompok aktiva finansial, kewajiban finansial, dan instrumen ekuitas, entitas harus mengungkapkan:

- informasi mengenai cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk persyaratan dan kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa datang; dan

- Kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan.

- Pengungkapan untuk setiap kategori aset keuangan apakah pembelian dan penjualan aset keuangan dicatat pada tanggal perdagangan atau pada tanggal penyelesaian.

- Jika instrumen keuangan bersifat signifikan, maka seluruh persyaratan dan kondisi instrumen tersebut harus diungkapkan.

4. Risiko Tingkat Bunga

- Informasi mengenai eksposur risiko tingkat bunga, termasuk :

- penilaian ulang (repricing) atau tanggal jatuh tempo kontraktual, tanggal mana yang lebih dahulu; dan
- tingkat bunga efektif, jika tersedia

- Mengindikasikan aset keuangan dan liabilitas keuangan mana yang:

- terekspos risiko tingkat bunga atas nilai wajar,
- terekspos risiko tingkat bunga atas arus kas, dan
- tidak secara langsung terekspos terhadap risiko tingkat bunga (misal instrumen ekuitas).

- Pengungkapan suku bunga efektif berlaku untuk obligasi, notes, pinjaman, dan instrumen keuangan sejenis yang melibatkan pembayaran di masa datang yang mencerminkan nilai waktu

dari uang.

- Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi instrumen keuangan seperti investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen derivatif yang tingkat bunga efektifnya tidak dapat ditentukan.

5. Risiko Kredit

- Mengungkapkan informasi mengenai eksposur risiko kredit, termasuk:
 - jumlah yang paling mewakili eksposur risiko kredit maksimal apabila pihak lawan tidak mampu memenuhikewajibannya, tanpa memperhitungkan nilai wajar dari agunan; dan
 - konsentrasi risiko kredit yang bersifat signifikan
- Aset keuangan dengan hak saling hapus dengan liabilitas keuangan, tidak boleh disajikan neto dalam neraca, kecuali penyelesaian akan dilakukan secara neto atau secara bersama-sama. Namun demikian, entitas mengungkapkan keberadaan hak secara hukum untuk melakukan saling hapus ketika menyajikan informasi seperti yang dipersyaratkan di atas.

6. Nilai wajar

- mengungkapkan nilai wajar tiap kelompok aset dan liabilitas dalam cara yang memungkinkan untuk diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam Neraca.
- Jika entitas tidak mengukur instrumen keuangan di neraca pada nilai wajar, maka entitas wajib menyediakan informasi nilai wajar pada pengungkapan tambahan
- Jika investasi dalam instrumen ekuitas atau derivatif yang terkait tidak memiliki kuotasi, maka instrumen tersebut diukur pada biaya perolehan berdasarkan Pernyataan ini. Fakta ini harus diungkapkan bersamaan dengan penjelasan instrumen keuangan tersebut, nilai tercatatnya, dan penjelasan mengapa nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dan jika memungkinkan, kisaran dari estimasi nilai wajar yang paling memungkinkan.

7. Pengungkapan Lainnya

Pengungkapan lainnya mengenai :

- (a) Penghentian pengakuan

- (b) Jaminan
- (c) Instrumen Keuangan Majemuk dengan Beberapa
- (d) Derivatif Melekat
- (e) Instrumen Keuangan pada Nilai Wajar
- (f) Reklasifikasi/Penggolongan Kembali
- (g) Laporan Laba Rugi dan Ekuitas
- (h) Penurunan Nilai
- (i) Wanprestasi dan Pelanggaran

2.2.2 Penerapannya pada industri perbankan

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas PSAK No 50 (Revisi 2006) tentang *Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan* dan PSAK No 55 (Revisi 2006) tentang *Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan* seharusnya sudah mulai diberlakukan pada 1 Januari 2009, namun karena terjadi krisis global dan keberatan yang diajukan oleh bank-bank di Indonesia menyebabkan pemberlakuannya diundur hingga 1 Januari 2010 dan diadopsi penuh pada 31 Desember 2010.

Keberatan ini dapat disebabkan akibat perubahan aturan-aturan akuntansi yang harus dipatuhi pada PSAK No. 50 (revisi 2006) setelah sebelumnya industri perbankan menggunakan PSAK No. 50 (1998). Setelah pada bagian pertama pembahasan di atas penulis telah memberikan beberapa perubahan aturan akuntansi dari PSAK No. 50 (1998) menjadi PSAK No. 50 (revisi 2006), maka berikut ini akan penulis jelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan PSAK No. 50 (revisi 2006) sebagai pengganti PSAK No. 50 (1998) di industri perbankan Indonesia.

- a.** Masalah Penyisihan Kerugian Kredit (*Loan-Loss Provisioning*) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CPKN)

Penyisihan kerugian kredit (*Loan-Loss Provisioning*) adalah penyisihan (*provisioning*) kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari portfolio kredit dan pendanaannya (*funding*) dapat naik atau turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit yaitu jika terjadi masalah terhadap itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan debitur untuk melunasi kredit beserta pinjamannya (*ability to pay*). Penyisihan kerugian ini penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*representation faithfulness*).

Selama ini dengan mengacu pada PSAK yang lama, penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) sehingga bank bisa menumpuk cadangan besar-besaran kalau bankir merasa *default* kredit-nya besar. Celah ini yang banyak dimanfaatkan bank untuk memoles laporan keuangannya dan melakukan *window dressing* yaitu merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu.

Namun, dengan diterapkannya PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008 yang menyesuaikan PSAK tersebut, bank dituntut untuk menentukan CPKN berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi atau *incurred loss*. Adapun CKPN dihitung dari perkalian beberapa komponen, yakni potensi gagal bayar (*potential of default*) dikalikan jumlah kredit yang bersangkutan. Komponen lainnya *loss given default (LGD)* yang merupakan porsi kerugian riil akibat gagal bayar yang benar-benar tak tertagih, di luar tingkat kembalian tagihan (*recovery rate*). *Potential of default* yang dihitung dari pengalaman kerugian yang sudah terjadi berdasarkan data historis setiap jenis kredit bank tersebut minimal selama 3 tahun terakhir

Selain itu, walaupun bank dapat mengakui adanya penurunan nilai karena pailit walaupun masih dalam 'kemungkinan', tapi tidak bisa dikatakan sebagai '*expected loss*' karena PSAK 55 (revisi 2006) mensyaratkan bukti 'objektif' itu harus ada. Jika penyisihan diakui ketika bukti objektif ada walaupun secara riil belum diakui adanya kerugian (*loss*) tetap dikatakan sebagai '*incurred loss*'.

Kesulitan yang dialami bank dalam penentuan CPKN ini adalah tuntutan kepada bank untuk mempunyai data historis mengenai pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank,

minimal 3 tahun. Bank dituntut untuk mempunyai data mengenai jumlah tingkat kerugian suatu kredit dari setiap nasabah. Dan untuk mendapatkan data ini, cukup rumit karena banyaknya jenis kredit dan jangka waktu yang berbeda

b. Standar baru ini dapat mengurangi sumber pendapatan bunga bank karena :

i. Pendapatan provisi dan komisi kredit kini menjadi pengurang dari nilai kredit yang diberikan guna menghitung pendapatan bunga efektif.

ii. Bunga surat berharga misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak boleh masuk sebagai pendapatan operasional bunga. Reklasifikasi bunga SBI ini berdampak pada bank yang banyak menempatkan dananya di luar kredit dengan ciri rasio pinjaman terhadap dana (LDR)-nya yang relatif kecil.

iii. Kredit sebagai asset bank digolongkan pada “Loan and Receivables” yang mana valuasinya adalah dengan cara *amortized cost*, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (dalam hal ini asset bank) akan dipengaruhi oleh proyeksi *cashflow* dari asset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikururkan)

c. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 membutuhkan sistem dan persiapan yang cukup lama karena harus menggabungkan semua laporan keuangan dalam satu paket. Dari sisi investasi, paling sedikit setiap bank harus mengeluarkan dan sebesar US\$1 juta untuk membeli sistem informasi dan teknologi untuk aplikasi pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006). (redaksi@bisnis.co.id)

d. Selain masalah teknologi, Sumber Daya Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini juga terbatas, jadi akan menambah masalah bagi perbankan untuk penerapan PSAK ini.

Hal-hal diatas yang kiranya merupakan alasan mengapa industri perbankan Indonesia mengalami kesulitan menerapkan PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006) ini hingga tahun 2010. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak manfaat dan kelebihan implementasi PSAK No. 50 & 55 (revisi 2006). Manfaat dan kelebihan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Dengan adanya standar akuntansi Indonesia yang mengacu pada standar Internasional ini, akan meningkatkan keandalan, keterbandingan dan *representative faithfulness*.

b. Transparansi terhadap pelaporan keuangan bank akan meningkat. Transparansi ini sangat urgent, mengingat kasus atas jatuhnya raksasa finansial Lehman Brothers saat krisis menghantam tahun 2008 silam yang diindikasikan karena adanya aspek akuntansi atas transaksi repo yang kurang wajar karena kurangnya transparansi. Hal tersebut berarti bahwa dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, maka kecurangan-kecurangan akan dapat diminimalisir. Selain itu, aturan –aturan baru pada PSAK revisian mempersempit kemungkinan adanya kecurangan. Seperti pada contoh yang dijelaskan di atas, yaitu masalah reklasifikasi dari dan ke kategori “FVTPL” dari kategori manapun dilarang, untuk menghindari usaha untuk menaikkan laba. Selain itu, adanya aturan yang tegas mengenai penentuan CPKN akan mengurangi kesempatan manajemen bank untuk melakukan kecurangan seperti *window dressing*. Bila dulu bank dapat menumpuk pencadangan besar dengan alasan kehati-hatian, meski kualitas kredit tidak mengkhawatirkan sehingga laba ikut turun. Tujuannya menghindari pajak atau mengatur ritme kinerja. Namun dengan diberlakukannya PSAK revisian ini, bank tidak bisa lagi melakukan hal itu.

Pengukuran dan Pelaporan Laporan Keuangan

Pengukuran, pelaporan, pengakuan, pencatatan dan disclosure atas laporan keuangan bagi perbankan merupakan konsep akuntansi yang sangat penting dan saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya agar membentuk laporan keuangan yang akurat, *accountability*, *complete* dan *transparan*. Untuk mempermudah pembahasan maka kita mulai bahas dari konsep yaitu :

A. Pengukuran

Untuk mendapat pemahaman yang lebih rinci tentang pengukuran maka Smith et.al (1995) membagi pengukuran menjadi 5 atribut pengukuran sebagai berikut :

- a.* Historical cost is the cash equivalent price exchanged for goods or services at the date of acquisition, Land, buildings, equipment, and most inventories are common examples of item recognized using the historical cost attribute.

- b. Current replacement cost is the cash equivalent price that would be exchanged currently to purchase or replace equivalent good or service. Some inventories are recognized at their replacement costs.
- c. Current market value is the cash equivalent price that could be obtained by selling an asset in orderly liquidation. Investments in securities often are reported using current market values.
- d. Net realizable value is the amount of cash expected to be received from the conversion of assets in the normal course of business. Generally, this attribute is equal to the sales prices less normal cost to sell. Net realizable value is used for recognizing short term receivables and some inventories.
- e. Present (or discounted) value is the amount of net future cash inflows or outflows discounted to their present value. Long term receivable and long term payable use this measurement attribute.

Menurut Belkaoui (2004) Measurement is a unit exchange and of measurement is necessary for the transactions of firms in a uniform manner. The common denominator chosen in accounting is the monetary unit. The exchangeability of goods, services and capital is measured in term of money.

Disamping itu menurut Kieso, et al (2001) untuk memahami konsep "Measurement" ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu yakni : Assumptions (Economic entity, Going Concern, Monetary Unit, Periodicity), Principles (Historical cost, Revenue Recognition, Matching, Full Disclosure) dan Constraints (Cost-benefit, Materiality, Industry Practice, Conservatism).

Jadi, pengukuran merupakan suatu konsep memilih atribut dalam mengukur hasil transaksi dengan menggunakan unit moneter atau nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan laba rugi dan neraca.

B. Pelaporan

Adanya Laporan keuangan berasal dari suatu keadaan ekonomi yang dibentuk baik secara perusahaan jasa, dagang dan industri baik secara bulanan maupun tahunan. Dalam pelaporan ini harus diperhatikan untuk mengenal lebih jauh laporan keuangan dan kegiatan perbankan yang akan dilaporkan kepada pihak ekstern maupun intern perusahaan.

Menurut Smith et.al (1995) for financial reporting to be most effective, all relevant information should be presented in an unbiased, understandable, and timely manner. This is sometimes referred to as the full disclosure. Because of the cost-benefit constraint discussed earlier, however, it should be impossible to report all relevant information.

Menurut PSAK No.5, Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen par. 21, informasi keuangan tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah Penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain dengan dasar penetapan harga antar segmen.

Jadi, pelaporan merupakan suatu proses informasi keuangan secara relevan dan efektif dalam laporan keuangan dan mengungkapkan transaksi keuangan yang lebih rinci dan akurat.

2. Pencatatan dan Pengakuan Laporan Keuangan Perbankan

A. Pencatatan

Pencatatan transaksi perbankan ada yang bersifat periodik dan ada yang bersifat perpetual, untuk bisa melakukan penerapan PSAK No.50 dan 55 bagi perbankan di Jakarta, sebenarnya pintu yang paling mudah mengerti melalui penguasaan Akuntansi Perbankan. Laporan keuangan disusun dari proses dan prosedur akuntansi, sedangkan pencatatan harus dimulai dari terjadinya transaksi keuangan perusahaan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan.

Menurut Smith et.al (1995) Recording Phase is Accurate financial statements can be prepared only if transactions have been properly recorded. A transaction is an event that involves the transfer or exchange of good or services between two or more entities.

Menurut Kieso et.al (2001) "The first step in the accounting cycle is analysis of transactions and selected other events. The problem is to what to record. No simple rule exists that state whether an event should be recorded. Most agree that change in personnel, change in managerial policies, and the value of human resources, though important, should not be recorded in the accounts. On the other hand, when the company makes a cash sale or purchase — no matter how small — is should be recorded.

Jadi Pencatatan merupakan analisa terhadap kegiatan transaksi dari dokumen pendukung yang akan dicatat ke dalam jurnal untuk menghasilkan laporan keuangan.

B. Pengakuan

Pengakuan dilakukan untuk menyatakan suatu transaksi baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang yang memenuhi kriteria (mempunyai manfaat ekonomi dalam perusahaan dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal) terhadap transaksi dan mencantumkan ke dalam neraca maupun laba rugi. Pengakuan transaksi ada yang bersifat ditangguhkan dan accrual.

Menurut Smith et.al (1995) Recognition is the process of formally recording an item and eventually reporting it as one element in the financial statement. Recognition involves both the initial recording of an item and any subsequent changes related to that item. To qualify for recognition, an item should meet four fundamental criteria definition, measurability, relevance and reliability.

Menurut Harry (1992) Recognition Revenue is defined here as the output of the enterprise in terms of its products or services. Notice that this definition says nothing about the receipt or inflow of assets as a result of revenue performance because defining revenue in this way can easily lead to problems in terms of when to recognized revenue as being earned.

Menurut Kieso et.al (2001) to be recognized in the main body of financial statement, an item should meet the definition of a basic element, be measurable with sufficient certainty, and be relevant and reliable.

Menurut Belkaoui (2004) "According to the cost principle, the acquisition cost or historical cost is the appropriate valuation basis for recognition of the acquisition of all goods and services, expense, costs, and equities. In other words, an item is valued at the exchanged price at the date of acquisition and is recorded in the financial statements at that value or an amortized portion of that value".

Revenue is measured in terms of the value of the products or services exchanged in an "arm's-length" transaction. This value represents either the net cash equivalent or the present discounted value of the money received or to be received in exchange for the products or services that the enterprise transfers to its customers.

Jadi, pengakuan merupakan suatu proses pembentukan transaksi inflow dan outflow keuangan yang berhubungan dengan perusahaan yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan Laporan Keuangan bagi Perbankan

Dalam industri perbankan banyak sekali hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, namun sebelum membahas lebih jauh mari kita lihat terlebih dahulu pengertian tentang pengungkapan dibawah ini yang menurut beberapa ahli.

Menurut Harry (1992) Disclosure refers to relevant financial information both inside and outside the main body of the financial statements themselves, including methods employed in financial statements where more than one choice exists it an unusual or innovative selection of methods.

Menurut Belkaoui (2004) Disclosure is a general consensus in accounting that there should be 'full', (refer to complete and comprehensive presentation of information) 'fair' (implies an ethical constraint dictating an equitable treatment of users) and "adequate " (connotes a minimum set of information to be disclosed) disclosure of accounting data. Full disclosure requires that financial statements be designed and prepared to portray accurately the economic events that have affected the firm for the period and to contain sufficient Of, information to make them useful and not misleading to the average investor. More explicitly, the full disclosure principle implies that no information of substance or of interest to the average investor will be omitted or concealed

Menurut Smith et.al (1995) ada beberapa hal yang perlu disclosures seperti Accounting Policies, Contingencies, Inventory Methods, Number of Shares of Stock Outstanding, Alternative Measurement.

Menurut Kieso et.al (2001) Often referred to as the full disclosure principle, it recognizes that the nature and amount of information included in financial report reflects a series of judgmental trade-offs. The trade-offs strike for (1) sufficient detail to disclose matters that make a difference to users, yet (2) sufficient condensation to make the information understandable, keeping in mind costs of preparing and using it.

Jadi, Disclosure dalam laporan keuangan harus memuat informasi yang lengkap dan menyeluruh bagi pemakai laporan keuangan dan memberikan informasi minimum yang tidak diungkapkan dibagian laba rugi, neraca, perubahan ekuitas dan arus kas wajib dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan seperti akte pendirian, kebijakan perusahaan, metode persediaan, metode penyusutan, jumlah karyawan pada akhir periode, dan lain-lain.

2.2.3. Karakteristik Perusahaan Perbankan

Menurut PSAK No. 31 maksud dan tujuan perusahaan perbankan adalah sebagai berikut :

A. Karakteristik Usaha Perbankan

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank

hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki

reputasi yang baik. Di samping itu, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam operasinya lebih banyak menggunakan danamasyarakat dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham.

B. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

C. Pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif, seperti kredit dan surat-surat berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai "fee based operation" atau "off-balance-sheet activities". Di samping itu, pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan likuiditas selain jumlah kewajiban yang harus dibayar, perlu diperhitungkan pula masalah perpencaran (spreading) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya.

D. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai persyaratan atau ketentuan bagi industri perbankan sejak permohonan ijin pada awal pendiriannya, persyaratan calon pengelola serta ketentuan-ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) dalam melakukan kegiatan usaha

bank. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter.

E. Memperhatikan karakteristik dan perkembangan usaha bank setelah adanya kebijaksanaan deregulasi dan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan usaha bank, diperlukan informasi keuangan bank yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan bank secara wajar. Untuk itu diperlukan suatu standar akuntansi keuangan yang khusus berlaku bagi perbankan.

H. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan bersifat umum, dan belum mengatur praktek-praktek akuntansi bagi industri khusus termasuk perbankan. Oleh karena itu, dalam praktek terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan suatu bank, sehingga daya banding laporan keuangan suatu bank dengan bank yang lain sering tidak tepat. Dalam rangka terciptanya keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Perbankan

Pengertian Bank Konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah **bank** yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan *prinsip konvensional* yang digunakan *bank konvensional* menggunakan dua metode, yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Bank Konvensional

- Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja
- Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang

Sistem bunga:

- Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak **Bank**
- Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak **Bank**
- Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
- Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
- Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

Dengan berlakunya akuntansi perbankan dalam semua perusahaan yang berkaitan dengan perbankan, maka diharapkan :

1. Terdapat keseragaman dalam praktik-praktik akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan perbankan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan.
2. Laporan keuangan menjadi lebih informative bagi pihak ekstem yang tidak langsung dalam perusahaan.
3. Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Laporan keuangan perusahaan perbankan terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan secara komparatif untuk 2 (dua) tahun buku berturut-turut. Menurut Harahap (1999) dalam bukunya "Analisis laporan keuangan",

“Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi perusahaan terutama bagi pihak yang menjadikan laporan keuangan sebagai sumbang saran dalam pengambilan keputusan”.

Oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2002) diungkapkan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cares seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sifat dan perkembangan bank dari waktu ke waktu, maka laporan keuangan disajikan secara komparatif untuk 2 (dua) tahun terakhir.

a. Neraca

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar {unclassified}, namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada Pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan. Setiap Aktiva Produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau penempatan bank dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari masing- masing aktiva produktif. Penyisihan penghapusan yang dibentuk disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dari masing- masing jenis aktiva produktif yang bersangkutan.

b. Laporan Komitmen dan Kontinjens

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Wajib disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontinjensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, pada tanggal laporan. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat "repurchase agreement (Repo), serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan lainnya. Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank. Komitmen dan kontinjensi, baik yang bersifat sebagai tagihan maupun kewajiban, masing- masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba-rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Laporan laba-rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba-rugi bank adalah sebagai berikut:

- a. wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban,
- b. unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional.

Komponen-komponen laporan laba rugi bank disusun dengan mengacu pada SAK untuk pos-pos yang bersifat umum dan Pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang Laporan Arus Kas, harus disusun berdasarkan konsep kas (cash concept) selama periode laporan. Laporan ini harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Di samping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam SAK dan Pernyataan ini, bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta (custodianship), dan penyaluran kredit kelolaan.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Bank yang mempunyai kantor cabang atau kantor operasional lainnya wajib menyusun laporan keuangan gabungan pada setiap tanggal laporan, yang meliputi seluruh kantornya baik yang ada didalam maupun di luar negeri. Dalam membuat laporan gabungan, saldo rekening antar kantor (termasuk pendapatan dan beban) wajib dieliminasi sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha bank secara wajar. Bank yang mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu, wajib membuat laporan konsolidasi yang meliputi posisi keuangan dan hasil usaha bank dan seluruh anak perusahaan pada akhir periode laporan:

a. Laporan konsolidasi tersebut dibuat bagi bank yang memiliki saham atau hak pemilikan atas lembaga keuangan lain yang jumlahnya lebih dari 50%. Sedangkan bagi bank yang memiliki saham atau hak pemilikan atas lembaga keuangan lain yang jumlahnya 50% atau kurang wajib diungkapkan (disclosure) dalam laporan keuangan.

b. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi saldo rekening-rekening yang menampung transaksi-transaksi antar perusahaan induk dan atau anak perusahaan (intercompany accounts) wajib dieliminasi sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan posisi keuangan serta hasil usaha bank secara wajar.

c. Pengecualian dari kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasi di atas dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAK. Sebelum membuat laporan keuangan gabungan atau konsolidasi laporan keuangan kantor cabang atau anak perusahaan di luar-negeri terlebih dahulu dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan dalam mata uang asing terlebih dahulu harus disajikan sesuai dengan SAK.
2. Aktiva dan kewajiban serta komitmen dan kontinjensi pada tanggal neraca, dari kantor cabang atau anak perusahaan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan. Sedangkan pos-pos ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis.

3. Laporan laba-rugi untuk setiap bulan dari kantor cabang dan anak perusahaan diluar negeri dijabarkan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan. Laporan laba-rugi untuk suatu tahun buku dari kantor cabang dan anak perusahaan di luar negeri merupakan penjumlahan dari laporan laba-rugi setiap bulan yang telah dijabarkan dalam mata uang rupiah.
4. Laporan arus kas dijabarkan kedalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah tanggal laporan, kecuali pos-pos laba-rugi yang dijabarkan dengan kurs tengah rata rata dan pos-pos ekuitas yang dijabarkan dengan menggunakan kurs historis.
5. Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan (translation adjustments).

g. Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim yang meliputi periode bulanan atau triwulanan merupakan bagian integral dari laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu laporan keuangan interim tersebut wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan merupakan ikhtisar transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk laporan keuangan perusahaan perbankan harus sesuai dengan PSAK-31 yang berarti laporan keuangan perusahaan perbankan mampu menyajikan informasi keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan perbankan yang dimulai dari kegiatan lapangan sampai dengan kegiatan dikantor.

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material Skala usahanya.

2.2.4 Unsur laporan keuangan bagi perusahaan perbankan

Laporan keuangan bagi pengusaha perbankan merupakan gambaran dari dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002) adalah sebagai berikut :

1. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di mana yang depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
2. Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hal residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002) adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
2. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang ada pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar. Laporan Keuangan harus disajikan secara komparatif untuk dua tahun buku berturut-turut. Meskipun PSAK No. 54 tentang Mata Uang Pelaporan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan mata uang selain rupiah sebagai

mata uang pelaporan, tetapi untuk perusahaan perusahaan perbankan harus menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya, yaitu :

1. Neraca

Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo. Komponen-komponen neraca harus disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus perusahaan perbankan.

1.1. Aktiva

Merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan customer.

1.1.1 Pengukuran

Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau budaya yang dapat diukur dengan andal. Aktiva tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

1.1.2 Pencatatan

Aktiva yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehan (cost) yang meliputi seluruh pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva tersebut. Aktiva yang tidak memberikan manfaat untuk periode akuntansi selanjutnya dapat langsung dicatat sebagai beban pada saat perolehannya.

Aktiva moneter seperti kas, tagihan yang timbul dari transaksi pertukaran atau sebagai imbalan atas penyerahan barang / jasa oleh perusahaan, umumnya dicatat berdasarkan nilai nominal yang bersangkutan.

Dalam transaksi pertukaran aktiva dimana uang tidak dipergunakan sebagai alat pertukaran secara langsung, seperti dalam hal perolehan aktiva tetap dengan penyerahan Surat-Surat berharga, aktiva yang diperoleh dicatat berdasarkan harga pertukaran yaitu nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau yang diserahkan, yang mana yang lebih handal.

1.1.3 Pelaporan

Penyajian aktiva dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar dan diklasifikasikan menurut urutan likuiditas. Pelaksanaan Pencatatan aktiva perbankan didasarkan pada konsep dasar pencatatan aktiva menurut PSAK.

A. Unsur-unsur dalam aktiva perusahaan perbankan

1. Kas & Bank

Merupakan pos neraca yang paling likuid, dengan demikian lazimnya disajikan pada urutan pertama dari aktiva. Pos yang digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank pada neraca, yakni : dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, persediaan perangko, cek mundur, cek kosong dari pihak ketiga, rekening giro pada bank diluar negeri yang tidak dapat segera dipakai.

2. Surat-Surat Berharga

Surat berharga yang mudah dijual merupakan bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan, bentuk penyertaan sementara ini harus mempunyai sifat sbb :

- a. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera.
- b. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan.
- c. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

2.1 Pencatatan

Dalam PSAK No.13 tentang Akuntansi untuk Investasi mengenai biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa efek.

2.2 Pelaporan

Dalam PSAK No.13 tentang Akuntansi untuk Investasi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar harus dicatat dalam neraca pada nilai terendah antara biaya dan nilai pasar. Biaya dapat ditentukan berdasarkan FIFO, rata-rata tertimbang atau LIFO. Nilai pasar dapat ditentukan berdasarkan portofolio agregat, dalam total atau menurut kategori investasi atau pada dasar investasi individual yang ditetapkan secara konsisten.

3. Piutang

Disclosure atas jumlah piutang yang dijamin harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban bersyarat dalam hubungan dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali. (sale of accounts receivable / note discounted with recourse) kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya. Juga harus diungkapkan besarnya piutang dagang yang berasal dari penjualan ekspor dan penjualan lokal.

Jika perusahaan mempunyai transaksi anjak piutang, maka perusahaan harus mengungkapkan hal-hal sbb

- a. Kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang baik tanpa recourse maupun recourse.
- b. Jumlah piutang yang dialihkan baik yang tanpa maupun dengan recourse yang memenuhi criteria penjualan, termasuk kerugian, piutang retensi anjak piutang, jatuh tempo, dan ikatan penting, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.
- c. Jumlah kewajiban anjak piutang dengan recourse, yang meliputi beban bunga, retensi, jatuh tempo dan jumlah piutang alihan, serta ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang.

3.1 Pencatatan

Dalam PSAK No.9 penyajian piutang diatur yakni piutang usaha, wesel tagih, piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban.

3.2 Pengungkapan

Dalam PSAK No.9 pengungkapan piutang sebagai jumlah piutang yang dijamin harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya.

Dalam catatan atas laporan keuangan juga perlu dipisahkan dan diungkapkan besarnya piutang dagang yang berasal dari penjualan ekspor dan penjualan lokal.

4. Investasi Jangka Panjang

Menurut PSAK No.13 tentang Akuntansi untuk Investasi, par.3 bagian penjelasan, Investasi didefinisikan sebagai suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

5. Aktiva Tetap

Dalam PSAK No.16, Aktiva Tetap dan Aktiva lain-lain, par 59, definisi benda yang dapat digolongkan sebagai aktiva tetap adalah sebagai berikut

- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva
- b. Besar kemungkinan (proable) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir kedalam perusahaan.

6.1 Pelaporan

Penyajian aktiva tetap dalam neraca diatur dalam PSAK No. 16 tentang Aktiva Tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

6.2 Pengungkapan

Jenis aktiva tetap yang dipergunakan oleh perusahaan perusahaan hutan harus diungkapkan menurut jenis dan lamanya umur penyusutan. Cara pengungkapan aktiva tetap sbb :

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir.
 - e. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan penambahan, pelepasan, akuisisi melalui penggabungan usaha, revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah, penurunan nilai tercatat, penyusutan, perbedaan pertukaran neto yang timbul pada pejabaran laporan keuangan suatu entitas asing dan setiap pengklasifikasian kembali.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
 - a. Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aktiva tetap yang dijaminakan untuk hutang.
 - b. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva tetap.
 - c. Jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam konstruksi
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aktiva tetap.
3. Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali hal berikut harus diungkapkan :
 - a. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali
 - c. Nama penilai independen
 - d. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
 - e. Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap.
 - f. Surplus penilaian kembali aktiva tetap.

7. Aktiva Tak Berwujud

Pengertian aktiva tak berwujud menurut PSAK No.19 yakni aktiva lancar dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Salah satu karakteristik aktiva tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai

nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Contoh dari aktiva berwujud ini adalah good will, hak paten, hak sewa dan hak cipta.

8. Pencatatan

Penilaian aktiva tetap tak berwujud diatur dalam PSAK No.19 dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal perolehan. Harga perolehan tersebut dinilai berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan, nilai wajar dari aktiva lain yang diperoleh, nilai tunai dari kewajiban yang ada atau nilai wajar dari aktiva yang diterima untuk saham yang dikeluarkan.

Aktiva tak berwujud harus diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva tersebut dan tidak boleh dibebankan seluruhnya periode perolehan. Apabila periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun, karena setelah jangka waktu tersebut diperkirakan aktiva tak berwujud tersebut tidak memiliki manfaat keekonomiannya lagi.

Metode amortisasi aktiva tak berwujud adalah garis lurus, kecuali perusahaan mempunyai metode lain yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi perusahaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Metode penelitian yang ideal merupakan metode yang sesuai dengan suatu problema penelitian yang dapat membuktikan kebenarannya. Dalam penyusunan tesis ini penulis mencoba merancang penelitian dengan metode deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif mencoba menjelaskan secara mendalam tentang pengukuran, pelaporan, pencatatan, pengakuan, pengungkapan laporan keuangan perusahaan perbankan yang sesuai dengan PSAK No. 50 dan 55. Penelitian dengan metode kualitatif mencoba memaparkan, menganalisa dan mengevaluasi tentang isu-isu yang ada dalam konsep laporan keuangan perbankan tersebut.

Metode ini juga menggambarkan kondisi keuangan pada perusahaan publik tersebut melalui data yang terdapat dalam laporan keuangan dengan mencerminkan kegiatan dilapangan bagi perusahaan perbankan. Selain itu penulis juga perusahaan perbankan yang disusun oleh akuntan berdasarkan PSAK No 31.

Alasan penulis memilih metode penelitian deskriptif adalah karena data Yang dikumpulkan untuk penelitian berasal dari literature dan dokumentasi sekunder di Bank Indonesia yang merupakan suatu permasalahan yang pernah ada, tajam dan tepercaya, serta dewasa ini sektor perusahaan perbankan menjadi salah satu isu penting. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul "Penerapan PSAK No.50 Dan 55 Pada Bank Konvensional Di Indonesia".

Dalam peneliti ini penulis ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit sosial yang menjadi subjek penelitian.

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan proposal tesis ini, pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, yaitu data perusahaan yang berhubungan dengan masalah penelitian melalui

a. **Literatur**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan, dengan mempelajari literatur dan karangan ilmiah yang mendukung.

b. Dokumentasi

Data berdasarkan dokumentasi diperoleh, mengenai laporan keuangan dan perusahaan disektor perusahaan perbankan. Data yang diberikan terdiri atas data sekunder antara lain gambaran umum perusahaan atau laporan keuangan tahun 2009 dan tahun 2010. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber antara lain Bank Indonesia.

Penulis memilih 3 perusahaan yang berada dalam sektor perusahaan perbankan yakni sebagai berikut :

1. PT. Bank Bukopin Tbk
2. PT. Bank Mandiri Tbk
3. PT. Bank BPR Tbk

Ketiga dari perusahaan diatas yang tidak dipilih oleh penulis adalah PT. Bank Mandiri Tbk dan Bank BPR, hal ini dikarenakan pada saat melakukan pengumpulan data Laporan Keuangan perusahaan banyak data yang tidak diberikan secara langsung serta akurat disamping itu juga kesulitan memperoleh sumber laporan keuangan dari manajemen setempat. Selain itu Bank BPR dalam penyajian pelaporannya menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU (Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat) bahwa standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) karena dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai

3.3. METODE ANALISIS DATA

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode analisis data sebagai berikut :

1. Metode analisis deskriptif

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas laporan keuangan berdasarkan PSAK-50

Dan 55 dengan mencoba menjelaskan secara mendalam tentang apa atau sifat dari suatu problema penelitian yang ditentukan. Metode analisis deskriptif tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan penjelasan terhadap pengukuran unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No.50 Dan 55.
- b. Menentukan pencatatan laporan keuangan perusahaan perbankan.
- c. Menunjukkan secara lengkap pelaporan perusahaan perbankan yang sesuai PSAK No. 50 Dan 55

2. Metode analisis kualitatif

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas laporan keuangan berdasarkan PSAK-50 dan 55 dengan memberikan penjelasan-penjelasan manfaat kepatuhan perusahaan perbankan yang bersifat definitif atas istilah-istilah teoritis dengan cara pembahasan yang logis.

Adapun penilaian kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK No.50 dan 55 untuk menunjukkan kesungguhan kepatuhan perusahaan perbankan dalam menggunakan laporan keuangan perbankan, berdasarkan PSAK 50 dan 55. Untuk melihat kesungguhan tersebut dapat ditinjau dari aspek pengukuran, pelaporan, pencatatan, pengakuan & pengungkapan dalam metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan dalam bentuk tentang fenomena yang bersangkutan. Kemudian penjelasan ini akan dianalisa dan dievaluasi secara mendalam atas setiap permasalahan yang ada dan menggunakan penalaran dan penguraian secara rinci dari masalah yang muncul.

BAB IV

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Subyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Bank Bukopin

Bank Bukopin adalah salah satu Lembaga Keuangan yang bentuk dan usahanya adalah Perseroan Terbatas. Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumen.

Ketiga segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Operasional Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Bank Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama “Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro.

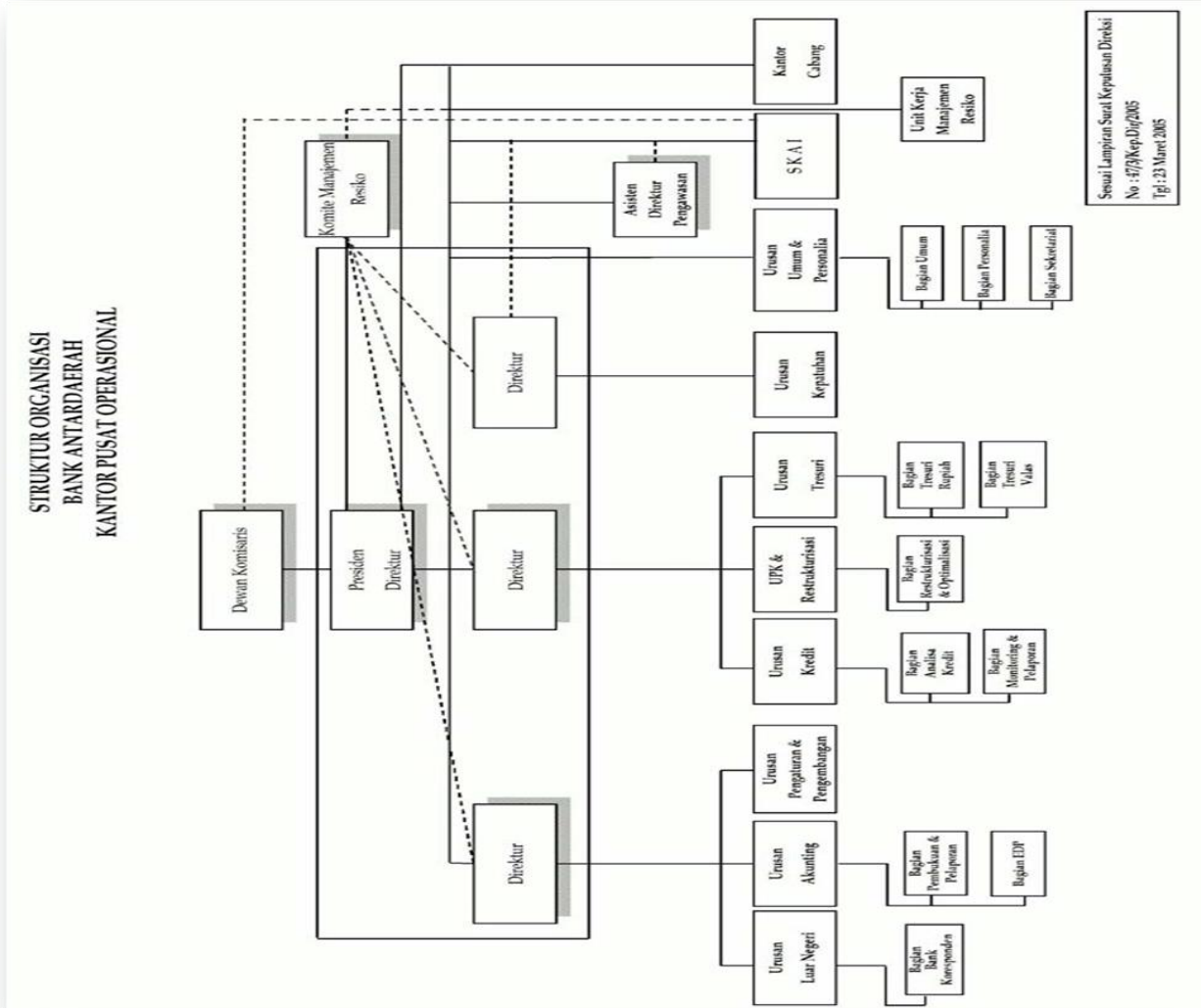
Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya citra Bank Bukopin sebagai lembaga perbankan yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

Untuk mencapai maksud di atas upaya yang dilakukan oleh bank Bukopin adalah dengan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti LPPI, STIE Perbanas, Standart Chartered Bank. Selain kerja sama dengan lembaga diluar bank, bank Bukopin juga melakukan program-program training yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kantor bank Bukopin seperti Account Officer, Operasional bank, Financial Risk Management, Leadership dan Staff Development.

Struktur Organisasi Bank Bukopin

Bank Bukopin yang mempunyai kantor pusat di Jl. M.T.Haryono Kav.50-51 Jakarta Selatan mempunyai Struktur Organisasi dan Job Discription sebagai berikut (lihat gambar : 4.1.)



Sumber: Bank Bukopin Kantor pusat

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bank

Unit kerja : Kantor Pusat

Jabatan : Dewan Komisaris

Fungsi : Sebagai badan Pengawas perusahaan yang diangkat oleh para pemegang saham dan mewakili mereka dalam mengawasi dan mensahkan rencana dan realisasi serta anggaran perusahaan dan memberikan persetujuan pengeluaran biaya serta pemberian kredit yang jumlahnya diatas kewenangan Direksi.

Atasan langsung : Rapat Umum Pemegang Saham

Membawahi : Direksi

Tugas-tugas pokok :

1. Mewakili para Pemegang Saham, Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Direksi Perusahaan.
2. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi perusahaan.
3. Memberikan persetujuan kredit atas permohonan kredit yang jumlahnya diatas wewenang Direksi.
4. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan manajemen secara berkala.
5. Bersama-sama dengan Anggota Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan perusahaan.
6. Secara berkala menghadiri Rapat Direksi untuk memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan. petugas administrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi.

Unit kerja : Kantor Pusat

Jabatan : Wakil Direktur Utama

Fungsi : Wakil Direktur Utama adalah eksekutif perusahaan yang dipilih dan diangkat oleh RUPS Sebagai Chief Executive Officer dari bank. Oleh karenanya Direktur Utama bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertindak sebagai dan atas nama para pemegang saham untuk mengarahkan kegiatan manajemen bank sesuai dengan kebijaksanaan

yang telah digariskan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Atasan langsung : Dewan Komisaris

Membawahi : Direktur

Tugas-tugas pokok :

1. Bersama-sama dengan Direktur utama membawa misi pengenalan perusahaan kepada umum dengan melakbukan fungsi Humas atau Public Relation.
2. Melibatkan diri dalam keanggotaan ataupun kepengurusan Perbanas Pusat, MP atau Organisasi, ataupun asosiasi perbankan pada tingkat nasional/daerah. Memimpin rapat ALCO, Credit committee dan berbagai committee untuk membantu Direksi dalam menjalankan operasional bank.
4. Mengawasi dan memeriksa bahwa tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat (Officer dan Senior Officer) serta petugas administrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi.
5. Mengawasi dan mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.
6. Melakukan seluruh tugas dan tanggungjawab yang dibebankan oleh Pemegang Saham dari suatu periode ke periode lainnya, termasuk didalamnya penetapan strategi bank.
7. Menandatangani seluruh surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan, baik sendiri maupun bersama dengan Direksi serta Senior Officer yang diberikan wewenang.
8. Menandatangani surat-surat keputusan penting Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi skala gaji, promosi karyawan, mutasi dan pemberhentian karyawan.

Unit kerja : Kantor Pusat

Jabatan : Direktur Pengawasan dan Pembinaan

Fungsi : Direktur Pengawasan adalah eksekutif Perusahaan yang dipilih dan diangkat oleh RUPS, oleh karenanya Direktur Pengawasan selain bertanggung jawab kepada pemegang saham, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama. Dalam fungsinya Direktur Pengawasan merupakan penanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pengawasan dan Pemeriksaan perusahaan.

Atasan langsung : Wakil Direktur Utama

Membawahi : Kepala Urusan Pengawasan dan Peminaan

Tugas-tugas pokok :

1. Mengawasi semua laporan yang harus dikirim dari Kantor Cabang maupun Cabang Pembantu yang terdiri dari : Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Tahunan.
2. Menetapkan jadwal kunjungan ke Cabang-Cabang dan Cabang Pembantu oleh bagian Pemeriksaan.
3. Menetapkan jadwal rapat dengan Dewan Audit bersama-sama dengan Kepala SKAI untuk mereview hasil temuan audit.
4. Memberikan informasi tentang keadaan keuangan dan akuntansi kepada pemeriksa ekstern yaitu Akuntan Pulik dan bank Indonesia.
5. Melakukan review terhadap Audit Mannual agar tetap *up to date*.

Unit kerja : Kantor Pusat

Jabatan : Direktur Operasional

Fungsi : Sebagai anggota eksekutif perusahaan yang dipilih dan diangkat oleh RUPS. Oleh karenanya Direktur Operasi bertanggung jawab kepada pemegang saham, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama.

Atasan langsung : Direktur Utama

Membawahi :

1. Kepala Urusan Luar Negeri
2. Kepala Urusan Teknologi
3. Kepala Urusan Akunting

Tugas-tugas pokok :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan garis-garis kebijaksanaan perusahaan di bidang Akunting, Pengaturan & Pengembangan, Tekhnologi dan luar negeri serta Sebagai koordinator operasi Cabang.
2. Merancang, menetapkan serta mengevaluasi Sistem Akunting dan Sistem Informasi Manajemen (MIS) dalam upaya menciptakan EDP system yang integrated untuk menuju pelaksanaan manajemen bank yang efektif dan efisien.

3. Merancang, menetapkan serta menciptakan reporting financial system, serta target date untuk memenuhi pelaporan pihak ekstern dan intern.
4. Mewakili Direksi bank dalam kegiatan-kegiatan intern maupun ekstern khususnya yang menyangkut masalah operasional.

4.1.3 Produk dan Pelayanan Bank Bukopin

Sebagai salah satu lembaga keuangan, kegiatan utama Bank Bukopin adalah melakukan penyerapan dana dan menyalurkannya dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan . Bank Bukopin dalam usahanya menarik calon nasabah adalah dengan menawarkan berbagai jenis produk dan jasa antara lain :

1. Menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. Tabungan, adalah simpanan dana dari masyarakat kepada bank yang pengambilannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank Bukopin. Ada dua macam tabungan yang ada di bank Bukopin yaitu Tabungan Siaga dan Tabungan Merdeka.
 - b. Simpanan Giro Rupiah, adalah bentuk simpanan dana dari masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu berupa cek atau bilyet giro.
 - c. Simpanan Giro Valas, adalah bentuk simpanan dari masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media kuitansi atau surat perintah pembayaran lainnya. Simpanan giro valas di bank Bukopin saat ini adalah dalam mata uang dollar Amerika.
 - d. Deposito Berjangka Rupiah, adalah simpanan dari masyarakat kepada bank dalam bentuk rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpan.

e. Deposito Berjangka Valuta Asing, adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan.

f. Deposito On Call, adalah simpanan masyarakat kepada bank dalam bentuk rupiah atau valas yang penarikannya dalam jangka waktu tertentu, di mana pada saat penarikan depositan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada bank sesuai perjanjian bank dengan depositan. Memberikan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan –perusahaan untuk keperluan pengembangan, rehabilitasi. Produk pinjaman akan tampak pada sisi aktiva neraca bank Bukopin, karena pinjaman tersebut merupakan piutang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang memerlukan. Jenis pinjaman yang diberikan di bank Bukopin adalah :

- a. Kredit Konsumsi, adalah suatu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang memiliki penghasilan tetap atau kontinuitas penghasilan terjamin.
- b. Kredit Usaha Kecil, adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil yang
- c. Kredit Investasi, adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dalam jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai barang modal seperti pendirian pabrik, fasilitas distribusi lokasi usaha dan pembelian mesin. Kredit tersebut juga dapat diperoleh melalui sindikasi.

2. Memberikan pelayanan jasa-jasa bank, yaitu :

- a. Jual beli Valuta Asing, adalah kegiatan menjual dan membeli mata uang asing dengan patokan nilai tukarnya terhadap mata uang rupiah.
- b. Transfer, adalah salah satu jasa yang diberikan bank untuk memindahkan dana antar Cabang atau antar bank.

- c. Giralisasi pembayaran rekening listrik, adalah fasilitas yang diberikan kepada bank nasabah untuk mendeet rekening nasabah guna pembayaran rekening listriknya.
- d. Surat referensi bank, adalah suatu bentuk pernyataan dari bank kepada bank lainnya bahwa yang bersangkutan adalah nasabah bank.
- e. bank garansi, adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank yang menyatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban apabila pihak yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhinya kepada pihak lain sesuai yang diperjanjikan.
- f. Letter of credit (L/C), adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh pihak bank yang erisikan jaminan pembayaran kepada pihak lain bilamana persyaratan-persyaratan yang disepakati sudah dipenuhi.

4.2 Analisis Data

Penerapan PSAK 50 dan 55 merupakan pembentukan penyisihan aktiva dimana penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif. Sebelum menggunakan PSAK 50 dan 55 perhitungan PPA menggunakan nilai kolektibilitas dari masing-masing kategori tunggakan tetapi setelah menggunakan PSAK cara penghitungan PPA menggunakan *Probability of default* dari masing-masing jenis tunggakan. Untuk lebih jelas lagi tentang perbedaan perhitungan PPA, maka akan dibahas dalam sub bab pembahasan.

Pada bagian ini akan dibahas lebih mendalam hasil evaluasi atas dampak PSAK No.50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan serta PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran terhadap cadangan penurunan nilai debitor, yang akan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan baik pemakai laporan keuangan dan pihak terkait di perusahaan untuk membandingkan jumlah cadangan penurunan nilai pada saat sebelum menerapkan PSAK No.50 dan 55 dengan setelah menggunakan PSAK No. 50 dan 55.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif, data ini diambil dari data intern debitur pihak Bank Bukopin pada tahun 2009 dan tahun 2010. Data ini meliputi banyak pinjaman, jenis pinjaman, jenis debitur dan kategori tunggakan debitur. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel lampiran, disana ditunjukkan tentang data apa saja yang digunakan. Dalam prakteknya pada bank Bukopin, pinjaman yang diberikan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pinjaman rekening koran (PRK),

Adalah pinjaman *revolving* jangka waktu (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan mempergunakan cek, bilyet giro atau alat perintah pembayaran lainnya. Tujuan PRK adalah untuk membiayai modal kerja. Cara mengangsur konvensional adalah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, yang terdiri dari dua pos yaitu cicilan pokok utang dan bunga. Pinjaman ini biasanya dikenakan oleh bank untuk pinjaman modal kerja dan pinjaman konsumtif. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo akhir bulan, total bunga selama satu bulan akan dibayar pada akhir bulan. Pada prakteknya dalam bank Bukopin, pinjaman rekening koran sangat diminati karena lebih mudah prosesnya.

2. Pinjaman reguler,

Pinjaman reguler disebut juga dengan pinjaman aksep, yaitu pinjaman *revolving* jangka pendek (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank menggunakan *Promotary Note*. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja. Setiap akan menandatangani surat aksep (surat pengakuan hutang), jumlah maksimum penarikan ditentukan oleh plafond limit yang diberikan.

3. Pinjaman *installment*,

Adalah suatu sistem pinjaman dimana pelunasannya dilakukan secara bertahap atau secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pinjaman *Installment* merupakan pinjaman non revolving yang dipergunakan untuk membiayai investasi aktiva tetap (alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha). Pencairan dananya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejak dari awal dengan menyerahkan surat akseptansi dana yang ditarik. Pembayaran kembali dilakukan dengan angsuran, baik dengan grace period, pembayaran hanya mencakup bunga saja, sedangkan angsuran pokok dan bunga dimulai setelah grace period berakhir. pinjaman *Installment* juga sangat diminati oleh debitur bank Bukopin karena merupakan pinjaman yang ringan. Kategori tunggakan sangat dibutuhkan agar dapat menghitung cadangan pembentukan penyisihan aktiva. Bank Bukopin telah membuat peraturan tentang kategori tunggakan. Menurut bank Bukopin kategori tunggakan dibagi menjadi:

1. Lancar, apabila pihak debitur tidak pernah menunggak.
2. Dalam perhatian khusus (DPK), apabila debitur menunggak antara 31 sampai dengan 60 hari.
3. Kurang lancar, apabila menunggak selama 61 sampai dengan 90 hari.
4. Diragukan, apabila menunggak lebih dari 90 hari
5. Macet, apabila debitur tidak membayar sama sekali

Sebelum menerapkan PSAK No.50 dan 55, pembuatan laporan keuangan dibuat oleh:

1. Bagian administrasi pinjaman, bertugas memberikan pengarahan kepada calon debitur, mendata calon debitur dan menghitung dana plafon keluar yang dipinjam oleh debitur.
2. Bagian *Accounting*, bertugas membuat *chart of account* dan perkiraan laporan keuangan yang terjadi ketika debitur telah mengambil dana plafon yang diberikan bank. Setelah diterapkannya PSAK No.50 dan 55, kedua bagian tersebut dan beberapa bagian lain dalam Bank juga terkena dampak penerapannya, dan yang terkena dampak dari penggunaan PSAK No.50 dan 55 adalah:
 1. Bagian *Account Officer*, karena harus menghitung *Impairment* (penurunan nilai) yang tidak ada pada peraturan sebelumnya.

2. Bagian administrasi pinjaman, bagian ini harus mempelajari peraturan yang baru tersebut karena sistem perhitungannya berbeda dengan peraturan sebelumnya.
3. Bagian *Accounting*, yang akan mengubah nilai *chart of account* dan menambah perkiraan-perkiraan baru yang akan terjadi setelah menggunakan PSAK 50 dan 55.
4. Bagian teknologi informasi, karena harus menyediakan *Software* baru yang dapat memudahkan bagian lain untuk menghitung pembentukan penyisihan aktiva.

Perubahan yang terjadi pada bagian-bagian tersebut nantinya akan sangat berpengaruh pada biaya yang akan dikeluarkan bank, karena biaya yang dihasilkan akan semakin meningkat. Pembahasan akan dilakukan secara sistematis untuk dapat memperlihatkan dampak yang terjadi sebelum dan sesudah menerapkan PSAK No.50 dan 55 serta terciptanya tujuan penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana bank menghitung cadangan pembentukan penyisihan aktiva. Untuk itu diperlukan penjelasan atas data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam prakteknya untuk menghitung *Probability of Default*, Bank Bukopin kantor pusat menggunakan *Migration Analysis* yaitu menggunakan *internal loan grading System (rating system)* dan bukan berdasarkan pengalaman kerugian. Hal ini dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi *outstanding* kredit dari *grade* tertinggi ke *grade* terendah. Dalam pembahasan ini ada dua teknik perhitungan yang digunakan yaitu pada saat sebelum menggunakan PSAK No.50 dan 55 serta saat perusahaan menggunakan PSAK No.50 dan 55. Berikut adalah penjelasan dari kedua perhitungan tersebut:

1. Sebelum menggunakan PSAK No.50 dan 55

Sebelum menggunakan PSAK 50 dan 55, perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai menggunakan kolektibilitas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 1% apabila pinjaman tersebut dinilai lancar, 5% apabila dalam perhatian khusus, 15% apabila dikatakan kurang lancar, 50% apabila diragukan dan 100% apabila pinjaman itu ternyata macet. Semua prosentase tersebut nantinya akan dikalikan dengan jumlah pinjaman debitur. Pada tabel 4.3, tabel 4.6 dan 4.9 dapat dilihat perhitungan kolektibilitas dari tiap-tiap kategori pinjaman.

2. Setelah menggunakan PSAK No.50 dan 55

Sebelum menghitung cadangan penurunan nilai januari 2010 maka sebelumnya harus menghitung posisi *Probability of Default* yang didapatkan dari pergerakan pinjaman tahun 2009. setelah mendapatkan *Probability of Default* tahun 2009 maka kita dapat menghitung brapa jumlah cadangan penurunan nilai tahun 2010. setelah itu akan dibandingkan jumlah cadangan penurunan sebelum dan setelah menggunakan PSAK No.50 dan 55, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Untuk lebih jelas maka dibawah ini akan diuraikan cara perhitungan *Probability of Default* dan selisih cadangan penurunan bagaimana antara sebelum dan setelah menggunakan PSAK No.50 dan 55.

4.3.1. Tabel Perhitungan Pembentukan Penyisihan Aktiva

Cara perhitungan PPA akan ditunjukkan dalam tabel-tabel agar pembaca lebih jelas dalam menangkap maksud dari penelitian ini. Tabel-tabel tersebut dibagi menurut jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1: Pergerakan PRK tahun 2009

Dalam tabel ini akan ditunjukkan bagaimana pergerakan pinjaman rekening koran yang terjadi selama tahun 2009, yang nantinya jumlah tersebut akan diprosentasekan untuk table selanjutnya. Data yang digunakan dalam tabel ini adalah data debitor kategori pinjaman rekening koran dan data tersebut dapat dilihat dalam lampiran 1 dan 2. Data yang terdapat pada lampiran tersebut akan dijumlahkan dan diletakkan menurut kategori pinjaman dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1:
pergerakan pinjaman – PRK pada tahun 2009

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)				
		Lancar	Tunggakan			
			DPK	Kurang Lancar	Dirag ukan	Macet
Lancar	153,264,422,150	150,298,116, 590	2,341,100,359	0	0	625,205,201
DPK	5,993,401,558	452,734,275	5,440,083,837	0	0	100,583,447
Kurang Lancar	0	0	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0	0	0
Macet	399,717,173	0	0	0	0	399,717,173
	159,657,540,881					

sumber: lampiran 1 dan 2 (diolah)

Keterangan: Saldo awal nantinya akan dimutasi kedalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.

Tabel diatas menjelaskan tentang pergerakan pinjaman PRK yang terjadi di Bank Bukopin kantor pusat selama tahun 2009. dijelaskan bahwa saldo awal periode tunggakan tahun 2008 yang terjadi akan bergerak ke dalam pos-pos periode tunggakan yang ada pada 2009. Jumlah yang ada dalam saldo awal periode tunggakan, jumlahnya harus sama dengan hasil akhir pada tahun berikutnya.

Dalam tabel diatas juga dijelaskan bahwa kategori tunggakan lancar pada awal tahun bernilai 153,264,422,150 dan selama tahun 2009 dana tersebut bergerak ada yang tetap lancar sebesar 150,298,116,590 itu berarti debitur yang memenuhi kewajibannya selama tahun 2009 nilainya lebih kecil dari awal tahun. Sedangkan yang bergerak ke kategori DPK sebesar 2,341,100,359, akan tetapi bank mengalami kerugian karena dalam kategori lancar, selama pergerakan 2009 sebesar 625,205,201 mengalami kredit macet yang tidak bisa ditagih. Hal itu berarti ada beberapa debitur yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan itu merugikan pihak perusahaan karena jumlah kredit macet itu nantinya akan dibayar oleh pihak bank. Untuk kategori tunggakan kurang lancar dan diragukan mempunyai nilai 0, dan itu berarti pada periode tersebut tidak ada debitur yang menunggak. Hal itu bisa dikatakan baik karena dengan begitu maka cadangan yang akan dibayar oleh bank akan semakin sedikit. Kategori tunggakan macet nilainya akan tetap sama sampai akhir tahun karena nilai yang tertera tersebut sudah dinyatakan tidak tertagih. Berdasarkan pergerakan pinjaman PRK yang terdapat pada tabel 4.1, maka akan diperoleh prosentase *Probability Of Default* yang akan ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2: Prosentase *Probability of Default* – PRK

Data yang terdapat dalam table ini adalah data pergerakan pinjaman yang ada dalam table 4.1 yang akan diprosentasekan. Hasil dari prosentase ini akan digunakan untuk menghitung *Probability of Default*. Perhitungan PD dilakukan agar bank dapat menghitung berapa nilai cadangan PPA setelah menggunakan PSAK. Cara perhitungan PD akan dijelaskan dalam penjelasan tabel tersebut. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan cadangan PPA akan ditunjukkan dalam tabel selanjutnya

Tabel 4.2:
Prosentase *Probability of Default* – PRK

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)					Probability of Default
		Lancar	Tunggakan				
			DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Lancar	153,264,422,150	98.06%	1.53%	0.00%	0.00%	0.41%	0.43%
DPK	5,993,401,558	7.55%	90.77%	0.00%	0.00%	1.68%	1.68%
Kurang Lancar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diragukan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Macet	399,717,173	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	
	159,657,540,881						

Sumber: Lampiran 1 dan 2 (diolah)

Keterangan perhitungan *Probability of Default*:

Macet : kategori macet tidak perlu dihitung PD nya karena dananya tidak tertagih

Diragukan : PD yang bernilai 0.00% tidak perlu dicadangkan

Kurang lancar : PD yang nilainya 0.00% tidak perlu dicadangkan

DPK : $(0.00\% \times 0.00\%) + (0.00\% \times 0.00\%) + 1.68\%$

Lancar : $(1.53\% \times 1.68\%) + (0.00\% \times 0.00\%) + (0.00\% \times 0.00\%) + 0.41\%$

Tabel diatas menjelaskan prosentase pergerakan saldo selama tahun 2009. Untuk menghitung prosentase tiap kategori tunggakan pada tahun 2010, maka digunakan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Contoh pada kategori lancar} &= \frac{\text{Saldo lancar tahun 2009} \times 100 \%}{\text{Saldo awal lancar tahun 2009}} \\
 &= \frac{150,298,116,590 \times 100 \%}{153,264,422,150} \\
 &= 98.06\%
 \end{aligned}$$

Saldo lancar tahun 2009 dapat dilihat dari tabel pergerakan pinjaman yang terletak pada kolom ketiga, saldo awal lancar tahun 2009 dapat dilihat pada kolom kedua. Begitu pula cara yang digunakan untuk menghitung prosentase kategori tunggakan yang lain. Pada kategori tunggakan macet nilainya tetap 100% karena dananya tidak dapat tertagih.

Tabel 4.1 dan tabel 4.2 saling berkaitan yaitu keterangan pergerakan pinjaman PRK yang diperoleh dari tabel 4.1 akan digunakan untuk menghitung prosentase tiap-tiap kategori tunggakan yang nilainya akan diletakkan pada tabel 4.2 dan nantinya akan dihasilkan nilai prosentase *Probability of default*.

Setelah mendapatkan nilai PD maka langkah selanjutnya adalah menghitung perbedaan nilai cadangan PPA antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55, perbedaannya ditunjukkan pada nilai cadangan PPA antara sebelum (kolom kelima) dan sesudah (kolom keenam) menggunakan PSAK dan selisihnya merupakan jumlah perbedaan yang dihasilkan antara kedua perhitungan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang apakah terdapat perbedaan jumlah cadangan pembentukan penyisihan aktiva akan ditunjukkan pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3: Posisi pinjaman – PRK sebelum dan sesudah menggunakan PSAK

Dalam tabel ini akan dijelaskan bagaimana perhitungan cadangan PPA antara sebelum dan setelah menggunakan PSAK 50 dan 55. Tabel ini juga menjelaskan tentang cara perhitungan PPA sebelum menggunakan PSAK sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan nilai cadangan PPA sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55.

Tabel 4.3
Posisi Pinjaman – PRK sebelum dan sesudah menggunakan PSAK

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 January 2010)	Sebelum PSAK 50 dan 55			Menggunakan PSAK 50 dan 55		Selisih
		Kol	Nilai Agunan	Cadangan PPA	PD	Cad. Penurunan	
Lancar	156,430,443,928	1%	0	1,564,304, 439.28	0.43%	672,650,90 9	891,653,5 30
DPK	384,695,070	5%	0	19,234,753 .50	1.68%	6,462,877	12,771,87 6
Kurang Lancar	194,583,274	15%	291,874, 911	0	0.00%	0	0
Diragukan	225,673,438	50%	293,375, 469	0	0.00%	0	0
Macet	283,616,173	100%	368,701, 025	0	100%	283,616,17 3	(283,616, 173)

Sumber: Lampiran 1, lampiran 2 dan Bank Bukopin (diolah)

Keterangan:

Saldo 31 januari 2010 didapat dari saldo tahun 2008 ditambah dengan tambahan debitur baru selama tahun 2009

Nilai agunan : 70 % dari harga pasar agunan

Cadangan PPA : Saldo awal x kolektibilitas → apabila saldo awal < nilai agunan, maka tidak perlu dicadangkan

Cadangan penurunan : saldo awal x PD

Selisih : Cadangan PPA – Cadangan penurunan

Jurnal sebelum PSAK 50 dan 55

Kategori lancar

Pembentukan penyisihan Aktiva	1.564.304.439,28	
Cadangan pembentukan penyisihan aktiva		1.564.304.439,28

Jurnal saat menggunakan PSAK 50 dan 55

Kategori Lancar

Kerugian penurunan nilai	672.650.909	
Cadangan kerugian penurunan nilai		672.650.909

Tabel diatas menjelaskan tentang perbedaan perhitungan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55. saldo january 2010 didapat dari saldo tahun 2009 dan tambahan debitur selama bulan januari 2010. Sebelum menggunakan PSAK, bank menghitung pembentukan aktiva menggunakan kolektibilitas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan saldo bulan januari akan dikalikan dengan kolektibilitas sesuai dengan kategori tunggakan masing-masing. Pada kategori tunggakan kurang lancar, diragukan dan macet terdapat nilai agunan yang didapat dari 70% harga pasar agunan. Nilai agunan yang tertera pada tabel sudah ditentukan oleh Bank Bukopin. Pada kategori lancar, cadangan PPA ditulis sebesar 1,564,304,439.28 hal ini terjadi karena nilai saldo awal > nilai agunan sehingga selisih antara keduanya akan dikalikan dengan kolektibilitas sebesar 1%. Begitu juga dengan kategori DPK, cadangan PPA dinyatakan sebesar 19,234,753.50 hal ini juga dikarenakan nilai saldo awal > nilai agunan sehingga selisih antara keduanya dikalikan dengan kolektibilitas sebesar 5%. Tetapi pada kategori kurang lancar,

diragukan dan macet nilai cadangan PPA sebesar 0 hal ini dikarenakan saldo awal dari tiap kategori tersebut lebih kecil dari nilai agunan sehingga selisih dari keduanya ditulis sebesar 0 dan tidak perlu dicadangkan. Setelah menggunakan PSAK, saldo awal akan dikalikan dengan *Probability of Default* (PD) yang prosentasenya didapatkan dari tabel sebelumnya.

Seperti yang terdapat di tabel bahwa sebelum menggunakan PSAK 50 dan 55, saldo kategori periode lancar akan dikalikan dengan kolektibilitas 1% tetapi saat menggunakan PSAK 50 dan 55 saldo awal akan dikalikan dengan 0.43% sesuai dengan perhitungan history selama tahun 2009. Dari tabel diatas juga diperoleh bahwa pembentukan penyisihan aktiva pada kategori periode lancar sebelum menggunakan PSAK adalah sebesar 1,564,304,439.28 setelah menggunakan PSAK maka jumlahnya menjadi 672,650,909. untuk itu selisih yang dihasilkan antara kedua metode perhitungan tersebut adalah sebesar 891,653,530. Hal itu berarti bahwa perhitungan cadangan pembentukan penyisihan aktiva lebih menguntungkan apabila menggunakan PSAK 50 dan 55. Pada kategori DPK juga mengalami perbedaan yang Sangat signifikan, saldo awal tahun 2009 menunjukkan nilai 384,695,070 dan sebelum menggunakan PSAK nilai penyisihan aktivanya menjadi 19,234,753.50 setelah dikalikan dengan kolektibilitas sebesar 5%, tetapi saat perhitungan menggunakan PSAK maka jumlah penyisihan aktiva menjadi 6,462,877 karena dari saldo awal dikalikan dengan 1.68 %, cara mendapatkan nilai tersebut sudah dijelaskan pada keterangan di atas. Dari kedua metode perhitungan tersebut maka selisihnya adalah sebesar 12,771,876 yang menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan PSAK lebih menguntungkan pihak bank, karena besarnya penyisihan aktiva yang dicadangkan semakin kecil. Pada kategori kurang lancar dan diragukan nilai selisih antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK sebesar 0, karena saat menggunakan kolektibilitas dinyatakan bahwa saldo awal lebih kecil dari nilai agunan sehingga cadangan PPA tidak perlu dicadangkan dan saat menggunakan PSAK, *Probability of Default* dinyatakan 0% sehingga tidak perlu dicadangkan. Namun apabila kredit tersebut dikatakan macet, maka penggunaan PSAK sungguh merugikan karena jika menggunakan kolektibilitas nilainya bisa 0 tetapi jika menggunakan PSAK nilainya akan tetap sama seperti saldo awal karena dana tersebut tidak tertagih.

Tabel 4.2 dan tabel 4.3 saling berkaitan yaitu data prosentase *Probability of Default* yang terdapat dalam tabel 4.2 akan digunakan untuk menghitung cadangan pembentukan penurunan nilai dalam tabel 4.3 dan akan diperoleh juga selisih antara perhitungan sebelum dan sesudah menggunakan PSAK. Hasil dari selisih tersebut digunakan untuk menunjukkan perbedaan cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dengan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55.

Jenis pinjaman yang kedua adalah pinjaman reguler, dan untuk mengetahui pergerakan pinjaman reguler selama tahun 2009 akan ditunjukkan dalam tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4: Pergerakan pinjaman reguler tahun 2009

Dalam tabel ini akan ditunjukkan bagaimana pergerakan pinjaman reguler yang terjadi selama tahun 2009, yang nantinya jumlah tersebut akan diprosentasekan untuk tabel selanjutnya. Data yang digunakan dalam tabel ini adalah data debitur kategori pinjaman rekening koran dan data tersebut dapat dilihat dalam lampiran 3 dan 4. Data yang terdapat pada lampiran tersebut akan dijumlahkan dan diletakkan menurut kategori pinjaman dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4:
Pergerakan pinjaman – Reguler pada tahun 2009

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)				
		Lancar	Tunggakan			
			DPK	Kurang Lancar	Dirag ukan	Macet
Lancar	103,142,750,000	99,842,750,000	3,300,000,000	0	0	0
DPK	895,000,000	545,000,000	350,000,000	0	0	0
Kurang Lancar	0	0	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0	0	0
Macet	2,600,000,000	0	0	0	0	2,600,000,000
	106,637,750,000					

sumber: lampiran 3 dan 4 (diolah)

Keterangan:

Saldo awal nantinya akan dimutasi kedalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan Macet

Tabel 4.4 menjelaskan tentang pergerakan pinjaman reguler yang terjadi di Bank Bukopn kantor pusat selama tahun 2009. dijelaskan bahwa saldo awal periode tunggakan tahun 2008 yang terjadi akan bergerak ke dalam pos-pos periode tunggakan yang ada pada 2009. Jumlah yang ada dalam saldo awal periode tunggakan, harus sama jumlahnya dengan hasil akhir pada tahun berikutnya.

Pada tabel diatas kategori lancar dan DPK mempunyai pergerakan yang bagus karena kedua kategori tersebut tidak ada yang bergerak dalam kategori tunggakan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam tabel juga dijelaskan bahwa kategori kurang lancar dan diragukan

mempunyai nilai 0, hal itu berarti pihak debitur tidak ada yang menunggak. Sedangkan dalam posisi macet juga memberikan nilai 0, itu juga baik karena berarti untuk pinjaman reguler semua debitur menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi pada kolom kategori macet ada nilai sebesar 2.600.000.000 nilai tersebut tidak mengalami pergerakan selama tahun 2009, hal itu berarti jumlah kredit macet yang dananya akan ditanggung pihak bank adalah sebesar 2.600.000.000. Untuk jenis pinjaman reguler ini bisa dikatakan debitur telah menjalankan kewajibannya dengan baik hal ini dapat dibuktikan pada pergerakan saldo kategori lancar dan DPK, kedua kategori tersebut tidak ada nilai saldo yang macet.

Berdasarkan pergerakan pinjaman reguler yang ditunjukkan pada tabel 4.4 maka akan diperoleh prosentase dari setiap kategori tunggakan yang nantinya digunakan untuk menghitung *Probability of Default* yang akan ditunjukkan dalam tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5: Prosentase *Probability of Default* – regular

Data yang terdapat dalam table ini adalah data pergerakan pinjaman yang ada dalam table 4.4 yang akan diprosentasekan. Hasil dari prosentase ini akandigunakan untuk menghitung *Probability of Default*. Perhitungan PD dilakukan agar bank dapat menghitung berapa nilai cadangan PPA setelah menggunakan PSAK. Cara perhitungan PD akan dijelaskan dalam penjelasan tabel tersebut. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan cadangan PPA akan ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 4.5:
Prosentase *Probability of Default* - Reguler

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)					Probability of Default
		Lancar	Tunggakan				
			DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Lancar	103,142,750,000	96.80%	1.53%	3.20%	0.00%	0.00%	0.00%
DPK	895,000,000	60.89%	90.77%	39.11%	0.00%	0.00%	0.00%
Kurang Lancar	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diragukan	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Macet	2,600,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	
	106,637,750,000						

Sumber: Lampiran 3 dan 4 (diolah)

Keterangan perhitungan *Probability of Default*:

Macet : kategori macet tidak perlu dihitung PD nya karena dananya tidak tertagih

Diragukan : PD yang bernilai 0.00% tidak perlu dicadangkan

Kurang lancar : PD yang nilainya 0.00% tidak perlu dicadangkan

DPK : PD yang nilainya 0.00% tidak perlu dicadangkan

Lancar : PD yang nilainya 0.00% tidak perlu dicadangkan

Tabel diatas menjelaskan prosentase pergerakan saldo selama tahun 2009. Untuk menghitung prosentase tiap kategori tunggakan pada tahun 2010, maka digunakan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Contoh pada kategori lancar} &= \frac{\text{Saldo lancar tahun 2009} \times 100 \%}{\text{Saldo awal lancar tahun 2010}} \\ &= \frac{99,842,750,000 \times 100 \%}{103.142.750.000} \\ &= 96.80 \% \end{aligned}$$

Demikian juga dengan kategori- kategori tunggakan lain, cara perhitungannya sama dengan cara diatas. Saldo lancar tahun 2009 dapat dilihat dari tabel pergerakan pinjaman yang terletak pada kolom ketiga, saldo awal lancar tahun 2009 dapat dilihat pada kolom kedua. Begitu pula cara yang digunakan untuk menghitung prosentase kategori tunggakan yang lain. Pada kategori tunggakan macet nilainya tetap 100% karena dananya tidak dapat tertagih.

Tabel 4.4 dan tabel 4.5 mempunyai keterkaitan yaitu keterangan pergerakan pinjaman reguler yang diperoleh dari tabel 4.4 akan digunakan untuk menghitung prosentase kategori tiap-tiap tunggakan yang nilainya akan diletakkan pada tabel 4.5 dan dari hasil prosentase tersebut dapat dihitung nilai *Probability of Default* dari setiap kategori tunggakan.

Setelah mendapatkan nilai *Probability of Default* pada tabel 4.5 maka langkah selanjutnya adalah menghitung perbedaan nilai cadangan PPA antara sebelum (kolom kelima) dan sesudah (kolom keenam) menggunakan PSAK No.50 dan 55. apabila terdapat selisih nilai antara kedua perhitungan tersebut berarti ada perbedaan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55 dan untuk lebih jelasnya maka perbedaannya ditunjukkan pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6: Posisi pinjaman – reguler sebelum dan sesudah menggunakan PSAK

Dalam tabel ini akan dijelaskan bagaimana perhitungan cadangan PPA antara sebelum dan setelah menggunakan PSAK 50 dan 55. Tabel ini juga menjelaskan tentang cara perhitungan PPA sebelum menggunakan PSAK sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan nilai cadangan PPA sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55.

Tabel 4.6:
Posisi pinjaman reguler Bank Bukopin kantor pusat

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 January 2010)	Sebelum PSAK 50 dan 55			Menggunakan PSAK 50 dan 55		Selisih
		Kol	Nilai Agunan	Cadangan PPA	PD	Cad. Penurunan	
Lancar	99,148,630,000	1%	0	991,486,30 0	0.00%	0	991,486,3 00
DPK	875,000,000	5%	0	43,750,000	0.00%	0	43,750,00 0
Kurang Lancar	0	15%	0	0	0.00%	0	0
Diragukan	132,000,000	50%	171,600, 000	0	0.00%	0	0
Macet	3,200,000,000	100%	4,160,00 0,000	0	0.00%	0	0

Sumber: Lampiran 3, lampiran 4 dan bank Bukopin (diolah)

Keterangan:

Saldo 31 januari 2010 didapat dari saldo tahun 2008 ditambah dengan tambahan debitor baru selama tahun 2009

Nilai agunan : 70 % dari harga pasar agunan

Cadangan PPA : Saldo awal x kolektibilitas → apabila saldo awal < nilai agunan, maka tidak perlu dicadangkan

Cadangan penurunan : saldo awal x PD

Selisih : Cadangan PPA – Cadangan penurunan

Jurnal sebelum PSAK 50 dan 55

Kategori lancar

Pembentukan penyisihan Aktiva	991.486.300
Cadangan pembentukan penyisihan aktiva	991.486.300

Jurnal saat menggunakan PSAK 50 dan 55

Kategori Lancar Tidak ada jurnal, karena tidak ada angka cadangan penurunan nilai aktiva. (tidak Perlu dicadangkan)

Tabel diatas menjelaskan tentang perbedaan perhitungan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55. Saldo January 2010 didapat dari saldo tahun 2009 dan tambahan debitor selama bulan Januari 2010. Sebelum menggunakan PSAK, bank menghitung pembentukan aktiva menggunakan kolektibilitas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan saldo bulan Januari akan dikalikan dengan kolektibilitas sesuai dengan kategori tunggakan masing-masing. Pada kategori tunggakan kurang lancar, diragukan dan macet terdapat nilai agunan yang didapat dari 70% harga pasar agunan. Seperti yang terdapat di tabel bahwa sebelum menggunakan PSAK 50 dan 55, saldo kategori periode lancar akan dikalikan dengan kolektibilitas 1% tetapi saat menggunakan PSAK 50 dan 55 saldo awal dikalikan dengan 0.00% sesuai dengan perhitungan history selama tahun 2009 dan itu berarti tidak perlu dicadangkan karena hasil dari perkalian saldo awal dengan PD adalah sebesar 0. Hal itu berarti bahwa terdapat perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55 dan perhitungan cadangan pembentukan penyisihan aktiva lebih menguntungkan apabila menggunakan PSAK 50 dan 55.

Pada kategori DPK juga mengalami perbedaan yang Sangat signifikan, saldo awal tahun 2009 menunjukkan nilai 875,000,000 dan sebelum menggunakan PSAK nilai penyisihan aktivitya menjadi 43,750,000 setelah dikalikan dengan kolektibilitas sebesar 5%, tetapi saat perhitungan menggunakan PSAK maka jumlah penyisihan aktiva menjadi 0 karena dari saldo awal dikalikan dengan PD sebesar 0.00%, cara mendapatkan nilai tersebut sudah dijelaskan pada keterangan di atas. Dari kedua metode perhitungan tersebut maka selisihnya adalah sebesar 43,750,000 yang menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan PSAK lebih menguntungkan pihak bank, karena tidak ada cadangan yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Pada kategori diragukan dan macet nilai selisih antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK sebesar 0, karena saat menggunakan kolektibilitas dinyatakan bahwa saldo awal lebih kecil dari nilai agunan sehingga cadangan PPA tidak perlu dicadangkan dan saat menggunakan PSAK, *Probability of Default* dinyatakan 0% sehingga tidak perlu dicadangkan.

Tabel 4.5 dan tabel 4.6 saling berkaitan yaitu data prosentase *Probability of Default* yang terdapat dalam tabel 4.5 akan digunakan untuk menghitung cadangan pembentukan penurunan nilai dalam tabel 4.6 dan akan diperoleh juga selisih antara perhitungan sebelum dan sesudah menggunakan PSAK. Hasil dari selisih tersebut digunakan untuk menunjukkan perbedaan cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dengan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55. Jenis pinjaman yang ketiga adalah pinjaman *Installment*, dan untuk mengetahui pergerakan pinjaman reguler selama tahun 2009 akan ditunjukkan dalam tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7: Pergerakan pinjaman *Installment* tahun 2009

Dalam tabel ini akan ditunjukkan bagaimana pergerakan pinjaman rekening koran yang terjadi selama tahun 2009, yang nantinya jumlah tersebut akan diprosentasekan untuk tabel selanjutnya. Data yang digunakan dalam tabel ini adalah data debitur kategori pinjaman rekening koran dan data tersebut dapat dilihat dalam lampiran 5 dan 6. Data yang terdapat pada lampiran tersebut akan dijumlahkan dan diletakkan menurut kategori pinjaman dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7:
Pergerakan pinjaman – *Installment* tahun 2009

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)				
		Lancar	Tunggakan			
			DPK	Kurang Lancar	Dirag ukan	Macet
Lancar	128,812,229,299	125,336,388, 636	2,661,362,608	678,980,641	0	135,497,414
DPK	3,041,685,626	1,056,852,41 8	1,495,558,191	336,484,762	0	152,790,255
Kurang Lancar	0	0	0	0	0	0
Diragukan	0	0	0	0	0	0
Macet	21,388,892	0	0	0	0	21,388,892
	131,875,303,817					309,676,561

Sumber: Lampiran 5 dan 6 (diolah)

Keterangan:

Saldo awal nantinya akan dimutasi kedalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet

Tabel diatas menjelaskan tentang pergerakan pinjaman *Installment* yang terjadi di Bank Bukopin kantor pusat selama tahun 2009. dijelaskan bahwa saldo awal periode tunggakan tahun 2008 yang terjadi akan bergerak ke dalam pos-pos periode tunggakan yang ada pada 2009. Jumlah yang ada dalam saldo awal periode tunggakan, harus sama jumlahnya dengan hasil akhir pada tahun berikutnya.

Pada tabel 4.7 juga didapatkan keterangan bahwa cukup banyak debitur yang menjalankan kewajibannya, hal itu dapat ditunjukkan dalam kolom ketiga kategori lancar tahun

2009 disitu ditunjukkan bahwa dana debitor yang lancar sebesar 125,336,388,636 dari saldo awal yang nilainya 128,812,229,299 dan itu berarti hanya sedikit debitor yang menunggak. Pada awal tahun 2009 kategori tunggakan kurang lancar dan diragukan tidak ada nilainya, tetapi selama pergerakan tahun 2009, kategori lancar dan DPK ada yang mengalami penurunann menjadi kategori kurang lancar, hal itu berarti pada jenis pinjaman *Installment* banyak bebitur yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan pergerakan pinjaman *Installment* yang ditunjukkan pada tabel 4.7 maka akan diperoleh prosentase dari setiap kategori tunggakan dan prosentase tersebut nantinya digunakan untuk menghitung *Probability of Default* yang akan ditunjukkan dalam tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8: Prosentase *Probability of Default* – *Installment*

Data yang terdapat dalam table ini adalah data pergerakan pinjaman yang ada dalam table 4.7 yang akan diprosentasekan. Hasil dari prosentase ini akan digunakan untuk menghitung *Probability of Default*. Perhitungan PD dilakukan agar bank dapat menghitung berapa nilai cadangan PPA setelah menggunakan PSAK. Cara perhitungan PD akan dijelaskan dalam penjelasan tabel tersebut. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan cadangan PPA akan ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel 4.8:
Prosentase *Probability of Default* – *Installment*

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2008)	Saldo (31 Desember 2009)					Probability of Default
		Lancar	Tunggakan				
			DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Lancar	128,812,229,299	97.30%	2.07%	0.53%	0.00%	0.11%	0.21%
DPK	3,041,685,626	34.75%	49.17%	11.06%	0.00%	5.02%	5.02%
Kurang Lancar	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Diragukan	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Macet	21,388,892	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00 %	
	131,875,303,817						

Sumber: Lampiran 5 dan 6 (diolah)

Keterangan perhitungan *Probability of Default*:

Macet : kategori macet tidak perlu dihitung PD nya karena dananya tidak tertagih

Diragukan : PD yang bernilai 0.00% tidak perlu dicadangkan

Kurang lancer : PD yang nilainya 0.00% tidak perlu dicadangkan

DPK : $(11.06\% \times 0.00\%) + (0.00\% \times 0.00\%) + 5.02\%$

Lancar : $(2.07\% \times 5.02\%) + (0.53\% \times 0.00\%) + (0.00\% \times 0.00\%) + 0.11\%$

Tabel diatas menjelaskan prosentase pergerakan saldo selama tahun 2009.

Untuk menghitung prosentase tiap kategori tunggakan pada tahun 2010, maka digunakan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Contoh pada kategori lancar} &= \frac{\text{Saldo lancar tahun 2009} \times 100 \%}{\text{Saldo awal lancar tahun 2010}} \\
&= \frac{125,336,388,636 \times 100 \%}{128,812,229,299} \\
&= 97.30 \%
\end{aligned}$$

Demikian juga dengan kategori- kategori tunggakan lain, cara perhitungannya sama dengan cara diatas. Saldo lancar tahun 2009 dapat dilihat dari tabel pergerakan pinjaman yang terletak pada kolom ketiga, saldo awal lancar tahun 2009 dapat dilihat pada kolom kedua. Begitu pula cara yang digunakan untuk menghitung prosentase kategori tunggakan yang lain. Pada kategori tunggakan macet nilainya tetap 100% karena dananya tidak dapat tertagih.

Tabel 4.7 dan tabel 4.8 mempunyai keterkaitan yaitu keterangan yang diperoleh dari tabel 4.7 akan digunakan untuk menghitung prosentase tunggakan yang nilainya akan diletakkan pada tabel 4.8. dari hasil prosentase tersebut dapat dihitung berapa nilai *Probability of Default* dari tiap-tiap kategori tunggakan. Setelah mendapatkan nilai PD maka langkah selanjutnya adalah menghitung perbedaan nilai cadangan PPA antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55, perbedaannya ditunjukkan pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9: Posisi pinjaman – *Installment* sebelum dan sesudah menggunakan PSAK

Dalam tabel ini akan dijelaskan bagaimana perhitungan cadangan PPA antara sebelum dan setelah menggunakan PSAK 50 dan 55. Tabel ini juga menjelaskan tentang cara perhitungan PPA sebelum menggunakan PSAK sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan nilai cadangan PPA sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55.

Tabel 4.9:
Posisi Pinjaman *Installment* Bank Bukopin Kantor Pusat

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 January 2010)	Sebelum PSAK 50 dan 55			Menggunakan PSAK 50 dan 55		Selisih
		Kol	Nilai Agunan	Cadangan PPA	PD	Cad. Penurunan	
Lancar	187,623,329,392	1%	0	1,876,233,294	0.21%	394,008,992	1,482,224 ,302
DPK	2,003,736,626	5%	0	100,186,831	5.02%	100,587,579	(400,747)
Kurang Lancar	116,543,240	15%	174,814, 860	0	0.00%	0	0
Diragukan	0	50%	0	0	0.00%	0	0
Macet	15,328,892	100%	19,927,5 60	0	0.00%	0	0

Sumber: Lampiran 5, lampiran 6 dan Bank Antardaerah (diolah)

Keterangan:

Saldo 31 januari 2010 didapat dari saldo tahun 2008 ditambah dengan tambahan debitor baru selama tahun 2009

Nilai agunan : 70 % dari harga pasar agunan

Cadangan PPA : Saldo awal x kolektibilitas → apabila saldo awal < nilai agunan, maka tidak perlu dicadangkan

Cadangan penurunan : saldo awal x PD

Selisih : Cadangan PPA – Cadangan penurunan

Jurnal sebelum PSAK 50 dan 55

Kategori lancar		
Pembentukan penyisihan Aktiva	1.876.233.294	
Cadangan pembentukan penyisihan aktiva		1.876.233.294

Jurnal saat menggunakan PSAK 50 dan 55

Kategori Lancar		
Kerugian penurunan nilai	394.008.992	
Cadangan kerugian penurunan nilai		394.008.992

Tabel 4.9 menjelaskan tentang perbedaan perhitungan cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK 50 dan 55. Saldo January 2010 didapat dari saldo tahun 2009 dan tambahan debitor selama bulan Januari 2010. Sebelum menggunakan PSAK, bank menghitung pembentukan aktiva menggunakan kolektibilitas yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan saldo bulan Januari akan dikalikan dengan kolektibilitas sesuai dengan kategori tunggakan masing-masing. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.9 bahwa sebelum menggunakan PSAK 50 dan 55, saldo kategori periode lancar akan dikalikan dengan kolektibilitas 1% tetapi saat menggunakan PSAK 50 dan 55 saldo awal akan dikalikan dengan 0.21% sesuai dengan perhitungan history selama tahun 2009. Dari tabel diatas juga diperoleh bahwa pembentukan penyisihan aktiva pada kategori periode lancar sebelum menggunakan PSAK adalah sebesar 1,876,233,294 dan setelah menggunakan PSAK jumlahnya menjadi sebesar 394,008,992 karena presentase *probability of default* sebesar 0.21%. selisih dari kedua metode tersebut adalah sebesar 1,482,224,302 dan itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai cadangan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55. Pada kategori tunggakan dalam perhatian khusus (DPK) nilai cadangan penyisihan aktiva sebelum menggunakan PSAK tercatat sebesar 100,186,831 tetapi saat menggunakan PSAK nilainya menjadi lebih besar yaitu 100,587,579 karena nilai *Probability of default* menunjukkan angka 5.02% dan hal itu berarti nilainya lebih besar dari sebelum menggunakan PSAK. Tetapi

dengan adanya perbedaan itu dapat ditarik kesimpulan jika memang terdapat perbedaan nilai pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55.

Dalam kategori tunggakan kurang lancar dan macet, cadangan PPA ditunjukkan dengan nilai 0 padahal pada awal tahun angkanya menunjukkan nilai 116,543,240 dan 15,328,892, hal itu terjadi karena saldo awal kedua kategori tunggakan tersebut nilainya lebih kecil dari nilai agunan sehingga tidak perlu dicadangkan. Perlu diketahui nilai agunan berasal dari 70% harga pasar agunan yang dikalikan dengan saldo awal. Menurut ketentuan apabila jumlah saldo lebih kecil dari pada nilai agunan maka pembentukan penyisihan aktiva tidak perlu dicadangkan.

4.3.2. Jurnal-jurnal saat penggunaan PSAK 50 dan 55:

1. Pada saat terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai kredit

a. Mencatat kerugian penurunan nilai

Kerugian penurunan nilai	xxx	
Cadangan kerugian penurunan nilai		xxx

b. Pengakuan bunga pada saat terjadinya penurunan nilai

(tidak ada pengakuan bunga pada saat bank tidak menerima pembayaran dari debitur)

2. Pada saat pengakuan amortisasi bunga

Kredit – beban amortisasi	xxx	
Pendapatan bunga		xxx

3. Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur

Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	xxx	
Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening		xxx

4. Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur

Kas/ rekening koran/ giro BI	xxx	
Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening		xxx

5. Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur		
Kredit – beban amortisasi	xxx	
Pendapatan bunga kredit		xxx
6. Pada saat menerima setoran bunga dari debitur		
Kas/ rekening koran/ giro BI	xxx	
Pendapatan bunga kredit		xxx
7. Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur		
Kas/ rekening koran/ giro BI	xxx	
Kredit – beban amortisasi		xxx
8. Penghentian pengakuan kredit dengan menjurnal cadangan kerugian penurunan nilai		
Cadangan kerugian penurunan nilai	xxx	
Kredit – beban amortisasi		xxx

Tabel 4.3.3.
Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan PSAK 50 dan 55

NO	KETERANGAN	SEBELUM	SESUDAH
1	Transaksi derivatif	Melekat pada satu pasal	Dikhususkan pembahasannya
2	Perhitungan Pinjaman	Menggunakan nilai wajar dan kolektibilitas	Menggunakan nilai wajar (di bebaskan)
3	Menentukan Cadangan	Menggunakan Kolektibilitas (1%, 5%, 15%, 50%, 100%)	Menggunakan bukti objektif (<i>Probability Of Default</i>)
4	Nama Akun Jurnal	Cadangan pembentukan penyisihan aktiva	Cadangan kerugian penurunan nilai
5	Dampak Bagi Bank	SDM telah menguasai perhitungan	Perlu pelatihan dan SDM baru yang mengerti tentang PSAK
6	Pembentukan Cadangan	Apabila lancar maka nilai cadangan akan lebih besar dari nilai saldo	Apabila lancar maka nilai cadangannya lebih kecil dan menguntungkan pihak Bank

Setelah melakukan penelitian dan perhitungan untuk mendapatkan nilai pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55, maka dapat dijelaskan bahwa dampak yang terjadi pada bank Bukopin kantor pusat adalah:

1. Pembentukan pencadangan penyisihan aktiva saat menerapkan PSAK nilainya lebih kecil dari sebelum penerapan PSAK.

2. Dengan pembentukan cadangan yang lebih kecil, maka pendapatan bank akan meningkat karena setiap pembentukan cadangan akan mempengaruhi laporan laba rugi. Apabila cadangan yang dihasilkan nilainya besar maka semakin besar pula biaya yang akan dikeluarkan oleh bank.
3. Data yang dihasilkan akan semakin akurat, karena dengan menggunakan *Probability of Default* yang diambilkan dari data intern bank berarti pembentukan cadangan sudah sesuai dengan kondisi bank.

Setelah menggunakan kedua metode, sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55, maka terdapat beberapa kesimpulan dari penerapannya yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila Apabila sama-sama lancar, PSAK lebih menguntungkan
- b. Apabila nasabah tidak pernah membayar kredit, maka berdasarkan PSAK kreditnya langsung dinyatakan 0% dan pihak Bank yang akan membayar. Hal itu akan menimbulkan biaya dan cadangan penurunan nilai kredit yang akan merugikan pihak bank.
- c. Terdapat perbedaan jumlah cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55.

Pada kerangka pemikiran peneliti membagi kategori debitur menjadi dua yaitu saat data debitur diolah menggunakan PBI dengan data yang diolah menggunakan PSAK No.50 dan 55. pada peraturan PBI akan dihasilkan nilai kolektibilitas yang akan dikalikan dengan saldo kategori tunggakan dan nilai agunan sehingga nanti akan menghasilkan nilai pembentukan penyisihan aktiva sedangkan jika menggunakan PSAK akan menghasilkan informasi apakah debitur tersebut memiliki bukti obyektif atau tidak untuk mendapat ka *Probability of Default* yang akan digunakan untuk menghitung pembentukan penyisihan aktiva. Dari kedua cara tersebut hasil akhirnya akan ditemui apakah terdapat perbedaan nilai cadangan penurunan nilai sebelum menggunakan PSAK dengan setelah menggunakan PSAK.

Dari hasil pengolahan data dan perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.3, tabel 4.6 dan tabel 4.9 menunjukkan perbedaan nilai cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55. Dalam tabel tersebut hampir semua kategori tunggakan yang dihitung menggunakan PBI dengan yang menggunakan PSAK No.50 dan 55 nilainya berbeda, dan itu menunjukkan terdapat perbedaan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No.50 dan 55. Telah dijelaskan pula bagian apa saja yang terkena dampak dari penerapan PSAK tersebut serta apa saja dampak yang terjadi pada perusahaan setelah menerapkan PSAK No.50 dan 55. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil karena telah sesuai dengan kerangka pemikiran awal yang dibuat oleh peneliti dan pembahasan diatas dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. 5.1 KESIMPULAN

PSAK 50 dan PSAK 55 revisi 2006 yang merupakan adopsi dari IAS 32 dan IAS 39, memiliki kecenderungan kearah akuntansi nilai wajar (*fair value accounting*). Hal ini bisa dilihat secara jelas dari: perlakuan reklasifikasi, pengukuran awal (*initial measurement*), penurunan nilai (*impairment*), dan diperkenalkannya pilihan nilai wajar (*fair value option*). Walaupun penggunaan nilai wajar pada laporan keuangan sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, PSAK 55 revisi 2006 memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang bagaimana hirarki pengukuran nilai wajar yang digunakan.

Pada saat ini bank Bukopin telah menerapkan secara utuh PSAK 50 dan 55 dalam pelaporan keuangannya, Dimana sebelum itu bank Bukopin melakukan secara parallel dalam penerapan data pelaporan keuangannya agar menyiapkan kesiapan dari pihak perbankan. Dalam hal ini selain masalah teknologi, Sumber Daya Manusia yang menguasai mengenai PSAK ini juga terbatas, jadi akan menambah masalah bagi perbankan untuk penerapan PSAK ini . Setelah melakukan analisa dan tujuan penelitian terhadap data yang dikumpulkan peneliti mencoba menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK-50 dan 55) bagi perbankan yang ada di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari dua metode yang digunakan yaitu sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Apabila sama-sama lancar, PSAK 50 dan 55 lebih menguntungkan.
 - b. Apabila nasabah tidak pernah membayar kredit, maka berdasarkan PSAK kreditnya langsung dinyatakan 0% dan pihak Bank yang akan membayar. Hal itu akan menimbulkan biaya dan cadangan penurunan nilai kredit yang akan merugikan pihak bank.

- c. Terdapat perbedaan jumlah cadangan pembentukan penyisihan aktiva antara sebelum dan sesudah menggunakan PSAK No. 50 dan 55.
2. Pada perbankan saat ini, perhitungan pembentukan penyisihan aktiva lebih menguntungkan jika menggunakan PSAK No.50 dan 55 karena nilai pembentukan penyisihan aktiva yang dicadangkan lebih kecil dari pada perhitungan menggunakan probabilitas dan itu artinya resiko yang dihadapi oleh bank lebih kecil.
 3. PSAK mempunyai dampak yang positif terhadap pembentukan penyisihan aktiva perbankan karena apabila cadangan penyisihan tersebut nilainya lebih kecil maka kerugian yang akan dialami bank juga akan semakin kecil.

1. Masalah yang dihadapi perusahaan perbankan dalam menyusun laporan yang sesuai PSAK No. 50 dan 55 sebagai berikut:

- a. Secara keseluruhan semua pengusaha perbankan belum siap menerapkan PSAK 50 dan 55, antara lain karena sumber daya manusia dan teknologi untuk melakukan kegiatan operasional belum siap.
- b. Penerapan PSAK 50 dan 55 bisa mengakibatkan perubahan besar terhadap neraca bank. Dimana bank harus membukukan penilaian aset maupun kewajiban berdasarkan nilai wajar. Dalam PSAK yang berlaku saat ini, bank cukup membukukan surat berharga dan instrumen derivatif berdasarkan nilai perolehan.
- c. Dalam kedua PSAK baru tersebut, biaya pencadangan atau provisi tidak lagi merujuk ke aturan BI tentang kolektibilitas kredit. Tapi, berdasarkan penilaian potensi kerugian atas naik turunnya tiap aset. Jadi, cara penilaian pencadangan tiap bank berbeda-beda.
- d. Selain itu PSAK 50 dan PSAK 55 juga menimbulkan kontroversi, karena penerapan revisi PSAK 50 dan PSAK 55 yang mengacu pada IFRS tersebut adalah penganutan *principle basis* yang dianut karena hanya prinsip dan konsep yang ditekankan dan mengaplikasiannya tergantung pada praktek yang ada, berbeda

dengan konsep sebelumnya yang menganut *rule basis* yang artinya segala sesuatu diatur.

B. 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh manajemen bank Bukopin serta pihak – pihak yang menginginkan untuk mengembangkan penerapan PSAK- 50 dan 55. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pengukuran laporan keuangan dalam penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur kinerja perusahaan agar lebih mengarah ke *discipline market* dengan adanya beberapa perubahan pada kebijakan yang ada seperti pengakuan data historis. Dalam menerapkan PSAK 50 dan PSAK 55 banyak konsekuensi yang dihadapi oleh perbankan dan dalam realitanya bank asing dan bank besar yang telah mengimplementasikan revisi PSAK tersebut.
2. Sebaiknya pengusaha perbankan melakukan penggolongan pinjaman berdasarkan kebutuhan, karna yang dilakukan perbankan saat ini masih berdasarkan jenis pinjaman bisnis ataupun sektor ekonomi pihak debitur. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat terlihat dengan jelas siapa yang dikatakan lancar, DPK, kurang lancar, diragukan bahkan macet.
3. Masalah yang dihadapi pengusaha perbankan tentunya diharapkan penelitian lanjutan lebih jeli dalam hal sebagai berikut :
 - a. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menyusun PSAK No. 50 dan 55 sebelumnya harus melakukan pembahasan secara detail dan menyeluruh bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk merancang dan menyesuaikan antara teori dan praktik perbankan di Indonesia.
 - b. Penerapan PSAK- 50 dan 55 akan membantu pihak Bank Indonesia untuk menilai apakah perusahaan perbankan di Indonesia layak atau tidak layak diberikan izin perbankan.

- c. Dapat menyeragamkan praktek akuntansi dan pelaporan keuangan, mendorong terciptanya komparabilitas laporan keuangan yang lebih informatif dan dapat mencerminkan kegiatan perusahaan perbankan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Arini M. Kasaluri, 2010,

<http://seminarakuntansi.warsidi.com/2010/06/financial-instrument-impementasi-psak.html>,

Akses tanggal 19 November 2010. Endah, 2010,

<http://endah26.wordpress.com/2010/05/12/revisi-pengantar-perbankan/>

Akses tanggal 18 November 2010. Fadjari Ari Dewanto, 2009

<http://vibizmanagement.com/column.php?sub=228&id=1270&page=finance&awal=10>

Akses tanggal 20 November 2010. Fajar Sidik, 2010,

<http://web.bisnis.com/keuangan/fokusbi/1id180670.html?PHPSESSID=o74oab715vvnv5tfel36b8bhij7>

Akses tanggal 18 November 2010. Fajar Sidik, 2010,

<http://auditme-post.blogspot.com/2010/05/penerapan-psak-50-55-tahun-depan.html>

Akses tanggal 19 November 2010. Ikatan Akuntan Indonesia, 1998, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 Akuntansi Instrumen Derivatif Dan Aktivitas Lindung Nilai, Jakarta. Jimmy Wales, 2010,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>,

Akses tanggal 20 November 2010. Prima consulting Group, 2009,

<http://primaconsultinggroup.blogspot.com/2009/05/workshop-psak-50-55-revisi-2006-sesuai.html>

Akses tanggal 19 November 2010. Rizka Septyana, 2010,
<http://re-revalota-soulmate.blogspot.com/2010/04/permasalahan-yang-ada-di-dunia.html>

Akses tanggal 18 November 2010. Tomi Sujatmiko, 2008,
<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/31/277/178329/bi-akan-tunda-pelaksanaan-psak-50-dan-55/bi-akan-tunda-pelaksanaan-psak-50-dan-55>

Akses tanggal 20 November 2010

www.antara.co.id

www.iaiglobal.co.id

www.antaranews.com/berita/1273574518/bi-psak-tidak-mungkinkan-bank-atur-pencadangannya

www.antaranews.com/berita/1273574464/bi-bank-asing-paling-siap-terapkan-psak

www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/36303/Penerapan-PSAK-Cegah-Window-Dressing

Bisnis Indonesia 6 Januari 2009: PSAK 50 & 55 Ditunda Setahun

Ikatan Akuntansi Indonesia. 1994. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2006. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 50 (revisi
2006), Instrumen Keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2006. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 50 (revisi
2006), Instrumen Keuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Exposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No 50 (revisi 2010).

<http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/35360/Bank-Dituntut-Lebih-Transparan-dan-Jujur-Laporkan-Neraca>

<http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/35431/Perbankan-Panen-Laba-di-Kuartal-I-2010>

<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=21>

<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=1&id=94>

http://auditme-post.blogspot.com/2010_01_01_archive.html

<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=97>

<http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/03/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html>